



**PENINGKATAN STATUS INDONESIA MENJADI ASSOCIATE MEMBER
MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)**

**(IMPROVEMENT OF THE STATUS OF INDONESIA TO BECOME ASSOCIATE
MEMBER OF MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG))**

SKRIPSI

oleh

FAIQ ZUHDI RAMADHAN

110910101047

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PENINGKATAN STATUS INDONESIA MENJADI ASSOCIATE MEMBER
MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)**

**(IMPROVEMENT OF THE STATUS OF INDONESIA TO BECOME ASSOCIATE
MEMBER OF MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG))**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

FAIQ ZUHDI RAMADHAN

110910101047

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almarhum ayahanda Gunarto Soetedjo yang selalu mengasihiku dan menyayangiku tiada henti sampai akhir hayatnya, dan ibundaku Diana Sutjiati yang sangat besar kasih sayangnya padaku dan tidak pernah lelah membimbingku.
2. Kedua adikku Faiz Zahir Ramadhan dan Dien Kurnia Muadza yang selalu mendukungku.
3. Guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang dengan sabar dan tanpa lelah mengajari muridnya.
4. Teman-temanku satu jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011.
5. Almamater Universitas Jember.



MOTO

“Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib, di sana telah tertulis rol yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya.”- Buya Hamka¹



¹ Hamka. 1951. *Tenggelamnya Kapal Van der Wijk*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 158.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiq Zuhdi Ramadhan

NIM : 110910101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG)” adalah benar-benar karya tulis ilmiah sendiri (kecuali jika dalam pengutipan substansi dan disebutkan sumbernya) dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya berani bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2018

Yang menyatakan,

Faiq Zuhdi Ramadhan

NIM. 110910101047

SKRIPSI

**PENINGKATAN STATUS INDONESIA MENJADI ASSOCIATE MEMBER
MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)**

**(IMPROVEMENT OF THE STATUS OF INDONESIA TO BECOME ASSOCIATE
MEMBER OF MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG))**

Oleh:

Faiq Zuhdi Ramadhan

NIM 110910101047

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Fuat Albayumi, SIP. M.A.

Dosen Pembimbing II : Drs. Abubakar Eby Hara MA, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peningkatan Status Indonesia menjadi *Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG)*” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Kamis
tanggal : 12 Juli 2018
waktu : 12.00
tempat : Ruang Ujian Bersama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Sekretaris I

Sekretaris II

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP.196305261989022001

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP 195803171985031003

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si.
NIP 197812242008122001

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, MA
NIP. 197404242005011002

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.
NIP 196402081989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG); Faiq Zuhdi Ramadhan 110910101047; 2018; 92 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon, 24-26 Juni 2015 menghasilkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah peningkatan status Indonesia dari *Observer* menjadi *Associate Member*. MSG sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan *Kanak and Socialist National Liberation Front* atau FLNKS dari Kaledonia Baru. Peningkatan status Indonesia menjadi *associate member* MSG mengundang pertanyaan tersendiri dikarenakan organisasi *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang sangat giat berupaya untuk menjadi anggota MSG demi kemerdekaan Papua Barat hanya menjadi *observer*, mengingat ULMWP juga didukung oleh beberapa anggota MSG seperti Vanuatu dan FLNKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan *Melanesian Spearhead Group* atau MSG meningkatkan status Indonesia dari yang sebelumnya adalah *observer* menjadi *associate member*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Observasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu observasi kepustakaan atau melalui data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melakukan pengumpulan data-data yang berasal dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, karya tulis, majalah, surat kabar dan data-data yang terdapat dalam situs-situs internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan MSG menjadikan Indonesia sebagai *associate member* adalah untuk mendekatkan Indonesia dengan negara-negara MSG. Dengan mendekatkan Indonesia dengan negara-negara MSG, maka MSG akan mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Keuntungan tersebut bantuan luar negeri dari Indonesia kepada negara-negara Melanesia akan semakin meningkat dan kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang seperti penanggulangan bencana dan perubahan iklim dan *capacity building* akan semakin meningkat. Tetapi peningkatan status Indonesia menjadi *associate member* juga karena *bargaining* dari MSG kepada Indonesia agar ULMWP dapat dijadikan *member* MSG, walaupun hanya sebatas *observer*. Dengan mengangkat status keanggotaan Indonesia, maka Indonesia juga

harus menyetujui dijadikannya ULMWP menjadi *observer*. *Bargain* dari MSG tersebut tidak membuat Indonesia merasa keberatan dikarenakan statusnya yang lebih rendah dari Indonesia sehingga MSG tidak akan kehilangan kerja sama dengan Indonesia yang sangat penting bagi negara-negara Melanesia.



PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, kasih, dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENINGKATAN STATUS INDONESIA MENJADI ASSOCIATE MEMBER MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG).”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang berguna untuk perbaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Fuat Albayumi, S. IP, MA selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun bagi penulis.
4. Drs. Abubakar Eby Hara MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah dengan dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun dan bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua Orang Tuaku, Almarhum Bapak Gunarto Soetedjo dan Ibu Diana Sutjiati yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, cinta, doa, dan semangat selama perjalanan penyelesaian tugas akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang banyak memberikan semangat tersendiri dalam penyelesaian tugas akhir.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, semoga kesuksesan menyertai kalian.

Semoga Allah selalu memberikan kasih dan rahmat kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya, Amin.

Jember, Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1. Neoliberal Institusionalisme.....	7
1.5.2. <i>Bargaining Politics</i>	10
1.6. Argumen Utama.....	11

1.7. Metode Penelitian.....	12
1.8. Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2. GAMBARAN UMUM MELANESIAN SPEARHAD GROUP.....	15
2.1. Gambaran Umum Kawasan Melanesia.....	15
2.1.1. Kondisi Geografis.....	17
2.1.2. Masyarakat Melanesia.....	19
2.1.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Melanesia.....	21
2.1.4. Pemerintahan di Melanesia.....	22
2.2. Gambaran Umum <i>Melanesian Spearhead Group</i>	23
2.2.1. Sejarah Terbentuknya <i>Melanesian Spearhead Group</i>	23
2.2.2. Tujuan Terbentuknya <i>Melanesian Spearhead Group</i>	29
2.2.3. Struktur Organisasi dan Keanggotaan <i>Melanesian Spearhead Group</i>	32
2.2.4. Pengambilan Keputusan dalam <i>Melanesian Spearhead Group</i>	39
2.2.5. Kegiatan <i>Melanesian Spearhead Group</i>	43
BAB 3. PERKEMBANGAN HUBUNGAN ANTARA MSG DENGAN INDONESIA DARI ABAD KE-20 SAMPAI INDONESIA MENJADI OBSERVER MSG.....	46
3.1. Awal Mula Hubungan <i>Melanesian Spearhead Group</i> dengan Indonesia.....	47
3.2. Perkembangan Kerjasama antara <i>Melanesian Spearhead Group</i> dengan Indonesia Tahun 2000-2011.....	51
3.3. Hubungan Indonesia – MSG pasca Diangkatnya Indonesia sebagai <i>Observer</i>	56
BAB 4. ALASAN MELANESIAN SPEARHEAD GROUP MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI ASSOCIATE MEMBER.....	64
4.1. Mendekatkan Indonesia Kepada Anggota <i>Melanesian Spearhead Group</i>	64
4.1.1. Meningkatkan Bantuan Indonesia kepada Negara-negara MSG.....	66
4.1.2. Meningkatkan Kerja Sama antara Indonesia dan anggota-anggota MSG.....	71

4.2. Sebagai <i>Bargaining Politics</i> terhadap Indonesia atas Keanggotaan ULMWP	77
BAB 5. KESIMPULAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84



DAFTAR TABEL

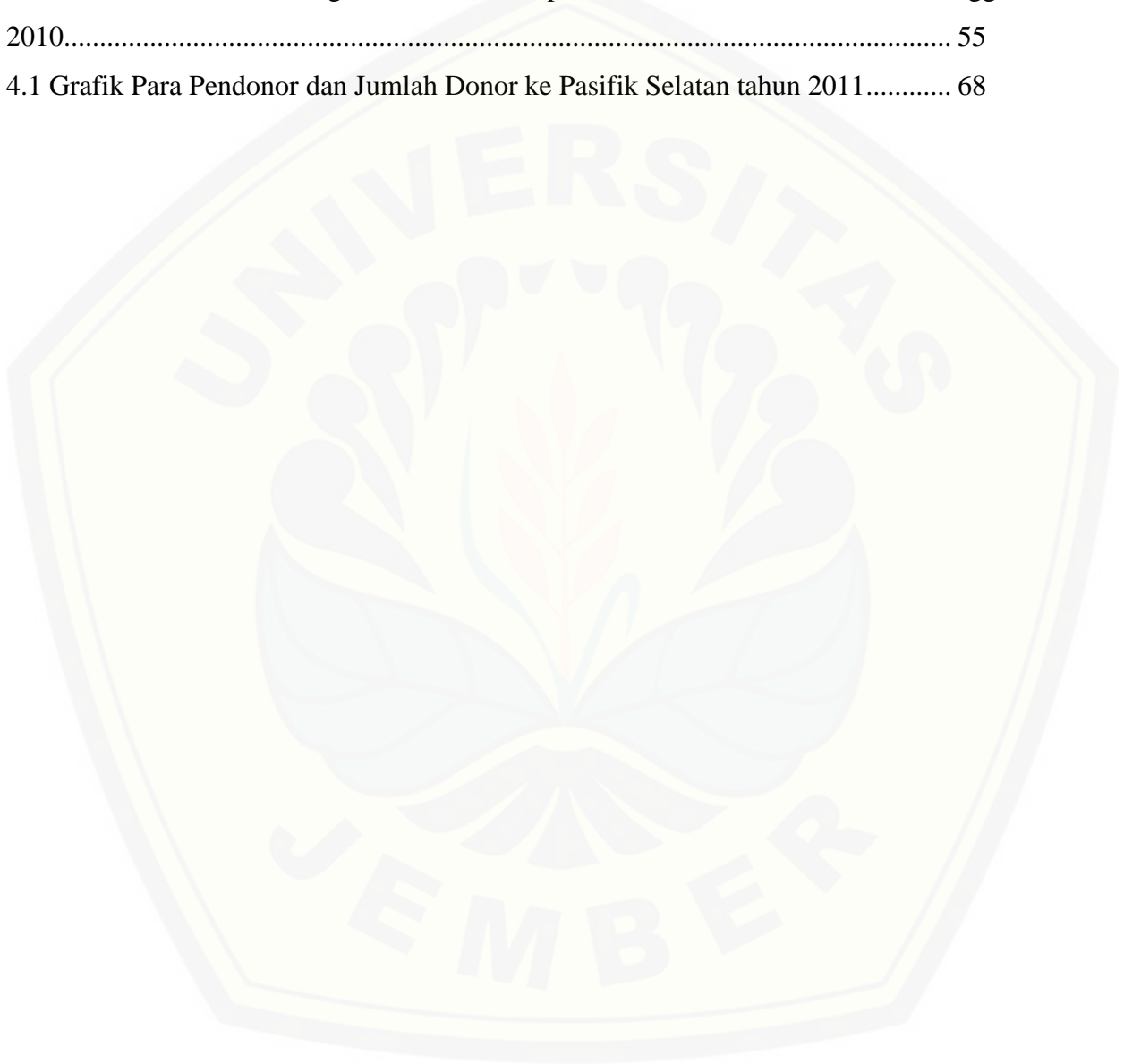
2.1 Perbedaan Hak Partisipatif dan Kewajiban antara *Associate Member* dan *Observer* MSG 35

2.2 Anggota *Melanesian Spearhead Group*..... 38



DAFTAR GAMBAR

2.1 Peta Pasifik Selatan Menurut Pembagian Ethno-Cultural	17
2.2 Peta Kawasan Melanesia.....	18
2.3 Masyarakat Melanesia dan Persebarannya	21
3.1 Demonstrasi Mendukung Kemerdekaan Papua Barat di Port Vila, Vanuatu, tanggal 5 Maret 2010.....	55
4.1 Grafik Para Pendonor dan Jumlah Donor ke Pasifik Selatan tahun 2011.....	68



DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BNPB	: <i>Badan Nasional Penanggulangan Bencana</i>
BPD	: <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i>
BPSDMKP	: <i>Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>
CTI	: <i>Coral Triangle Initiative</i>
DCA	: <i>Development Cooperation Agreement</i>
FLNKS	: <i>Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste</i>
FMM	: <i>Foreign Ministers Meeting</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HERCC	: <i>Humanitarian and Emergency Response Coordination Centre</i>
IUCN	: <i>International Union for Conservation of Nature</i>
JBC	: <i>Joint Border Committee</i>
KSST	: <i>Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
MMDiREx	: <i>Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise</i>
MSG	: <i>Melanesian Spearhead Group</i>
MSG-CACM	: <i>MSG Council of Arts and Culture Meeting</i>
MSG-FTA	: <i>MSG Free Trade Agreement</i>
NPWP	: <i>National Parliament of West Papua</i>

The page features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow and red floral design in the center, surrounded by the text 'UNIVERSITAS JEMBER' in a circular arrangement.

NRFPB	: Negara Republik Federal Papua Barat
PDB	: Produk Domestik Bruto
PIF	: <i>Pacific Island Forum</i>
PIDF	: <i>Pacific Island Development Forum</i>
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
SOM	: <i>Senior Officials Meeting</i>
SPC	: <i>South Pacific Commision</i>
SPF	: <i>South Pacific Forum</i>
SSC	: <i>South-South Cooperation</i>
TCDC	: <i>Technical Cooperation among Developing Countries</i>
TCTP	: <i>Third Country Techincal Cooperation</i>
ULMWP	: <i>United Liberation for West Papua</i>
UPT	: Unit Pelaksana teknis
VFWPA	: <i>Vanuatu Free West Papua Association</i>
WPNCL	: <i>West Papua National Coalition for Liberation</i>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasifik Selatan adalah sebuah kawasan yang kebanyakan terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang amat kecil. Negara-negara ini sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir pun, kawasan ini tetap menjadi rebutan bagi kekuatan-kekuatan besar yang memenangkan perang. Regionalisme di Pasifik Selatan lahir sebagai upaya untuk membebaskan pengaruh asing dari kawasan tersebut. Salah satu organisasi regional yang berdiri di kawasan Pasifik Selatan adalah *Melanesian Spearhead Group*.

Melanesian Spearhead Group atau MSG merupakan sebuah organisasi regional yang berdiri di kawasan Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara yang memiliki ras Melanesia. Organisasi ini mengatur perjanjian perdagangan preferensial dan mendukung pembangunan ekonomi anggotanya. Anggota MSG antara lain Republik Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan *Kanak and Socialist National Liberation Front* atau *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* atau disingkat FLNKS (Cain, 2014). FLNKS sendiri merupakan partai politik bentukan aliansi militan pro-kemerdekaan di New Caledonia yang didirikan pada tahun 1984 (Wenda, 2016). Visi yang dimiliki oleh MSG adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Melanesia.

Melanesian Spearhead Group digagas pada tanggal 17 Juli 1986 pada sebuah pertemuan informal yang diadakan di Goroka, Papua Nugini, yang diselenggarakan oleh tiga negara kepulauan Pasifik Melanesia yaitu Papua Nugini, Vanuatu dan

Kepulauan Solomon, bersama dengan perwakilan dari kelompok FLNKS. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin negara-negara Melanesia dan FLNKS sepakat bahwa solidaritas dan kebersamaan merupakan hal yang sangat penting dalam menangani isu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama. Dua tahun kemudian pada tanggal 14 Maret 1988, Perdana Menteri Papua Nugini, Paias Wingti, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Yehezkiel Alenia dan Perdana Menteri Vanuatu, Walter Lini menandatangani enam poin perjanjian "*Agreed Principles of Cooperation Among the Independent States in Melanesia*", yang menandakan berdirinya *Melanesian Spearhead Group* (Forau, 2011). Kemudian FLNKS secara resmi bergabung pada tahun 1989 dan Republik Fiji bergabung menjadi *observer* pada tahun 1993 dan baru bergabung menjadi *full member* pada tahun 1998. Pada tanggal 23 Maret 2007, para anggota MSG menandatangani *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* yang kemudian menjadikan MSG diakui sebagai lembaga formal yang diakui dalam hukum internasional, dan kemudian pada tahun 2008 MSG mendirikan sekretariat di Port Vila, Vanuatu (Wardhani, 2015:207).

Saat awal dibentuk MSG merupakan organisasi yang membahas isu politik. Namun demikian, fokus organisasi tersebut berubah pada tahun 1993 di mana mereka lebih membahas isu ekonomi, sosial dan pembangunan. Dalam perkembangannya, MSG tidak hanya bekerja sama dengan negara di wilayah pasifik saja, MSG juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbeda kawasan, khususnya dengan Pemerintah Indonesia. Indonesia seperti halnya negara-negara anggota MSG lainnya adalah sebuah negara kepulauan yang berjuang untuk berkembang dan tumbuh. Secara geografis, Indonesia adalah negara yang unik karena Indonesia terletak di persimpangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Indonesia bagian timur, yang lebih cenderung ke Australia daripada Asia, dihuni oleh 11 juta orang dari budaya

Melanesia, tersebar di lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, provinsi Maluku dan Maluku Utara di kepulauan Maluku, provinsi Papua Barat dan Papua di New Guinea bagian Indonesia. Kerja sama negara-negara anggota MSG dengan Indonesia sudah lama dilakukan bahkan sebelum MSG dibentuk, khususnya Fiji dan Papua Nugini. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara pendonor bantuan di kawasan Pasifik Selatan.

Kerja sama MSG dengan Indonesia menjadi semakin erat ketika Indonesia diterima menjadi negara *observer* (pengamat) MSG pada KTT MSG ke-18 pada bulan Maret 2011 di Suva, Fiji (Wardhani, 2015:207). Sejak Indonesia menjadi pengamat dalam organisasi MSG, kerja sama multilateral Indonesia dengan MSG semakin gencar dan meliputi bidang perdagangan, perekonomian dan keamanan. Bentuk kerja sama yang telah dilakukan diantaranya adalah pada tanggal 7 Januari 2014 sampai tanggal 8 Januari 2014, Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, bersama delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Suva, Fiji dalam rangka kerjasama pembangunan *Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group* (Wardhani, 2015:207). Bentuk kerja sama yang lain adalah kunjungan kerja ke Indonesia pada Januari 2014 oleh MSG dalam rangka “*Promoting Economic Ties & Development Cooperation*”, yang merupakan hasil dari keputusan *MSG Leaders Summit* ke-19 yang digelar pada tanggal 19 Juni 2013 di Noumea, New Caledonia. Melalui kunjungan tersebut, Indonesia dan MSG meningkatkan hubungan dan kerjasama yang lebih luas serta mengupayakan konsultasi yang lebih erat untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama guna meningkatkan hubungan dan kerja sama antara MSG dengan Indonesia (Kogoya, 2014).

Kerja sama antara MSG dengan Indonesia tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh anggota MSG. Beberapa anggota MSG seperti Vanuatu dan FLNKS kerap kali menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap Indonesia, khususnya Vanuatu yang sering memiliki pendirian yang berbeda dengan Indonesia dan secara terang-

terangan menolak setiap langkah yang diambil Indonesia dalam menyikapi masalah di Papua Barat. Vanuatu menganggap bergabungnya Indonesia menjadi negara *observer* di MSG merupakan pelanggaran dari visi dan tujuan alasan *Melanesian Spearhead Group* dibentuk. Karena itulah Vanuatu lebih mendukung *The United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang merupakan sebuah organisasi yang berusaha untuk melepaskan Papua dari Indonesia untuk menjadi anggota dari MSG daripada Indonesia.

Tetapi pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon tanggal 24 Juni 2015 sampai tanggal 26 Juni 2015, status Indonesia ditingkatkan dari *observer* menjadi *associate member*, sedangkan ULMWP hanya dijadikan *observer*. Perwakilan akan dipilih dari lima provinsi di Indonesia yang warganya memiliki budaya Melanesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan provinsi Papua untuk mewakili Indonesia di MSG. Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill berkata bahwa para pemimpin MSG mengakui aplikasi Indonesia untuk bergabung dengan MSG sebelum pernyataan resmi bersama dirilis ke publik (Fox, 2015). Selain itu Perdana Menteri Peter O'Neill juga menyatakan bahwa status Indonesia akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi menjadi status keanggotaan penuh MSG (Piliang, 2015). Bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi *associate member* MSG tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan tersendiri, mengingat sikap beberapa anggota MSG yang menolak kerja sama dengan Indonesia yang bertolak belakang dengan keputusan anggota-anggota MSG pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-20. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul:

PENINGKATAN STATUS INDONESIA MENJADI ASSOCIATE MEMBER MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian karya ilmiah diperlukan adanya pembatasan-pembatasan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah. Pembatasan yang dimaksud disini adalah menghindari ketidak fokusan penulis dalam membahas masalah yang diangkat supaya tidak mengurangi bobot dari karya ilmiah. Selain itu, ruang lingkup pembahasan juga akan mempermudah penulis untuk mengkaji peristiwa-peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Ruang lingkup pembahasan dalam proposal penelitian ini terdiri dari batasan waktu dan batasan materi.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi diperlukan guna menunjuk fokus atau materi yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya ilmiah agar pembahasan tersebut tidak meluas dari alur pembahasannya. Supaya karya ilmiah ini sesuai dengan tema utama, maka dalam skripsi ini fokus utama penulis adalah mengenai apa yang menyebabkan MSG meningkatkan status keanggotaan Indonesia yang mulanya *observer* atau menjadi *associate member*. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masalah lain yang masih relevan dengan subjek yang diteliti juga akan dibahas. Hal ini untuk mendukung pokok permasalahan agar karya ilmiah ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan analisis yang kuat.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan rentang waktu terjadinya suatu peristiwa yang dianalisis pada sebuah penelitian. Sama seperti batasan materi, batasan waktu sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar pembahasan tetap fokus dan akan memperjelas kapan masalah yang dikaji terjadi. Batasan waktu yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah dari KTT MSG ke-18 pada bulan Maret 2011 pada saat Indonesia menjadi anggota *observer* sampai KTT MSG ke-20 pada

bulan Juni 2015, yaitu pada saat status keanggotaan Indonesia di MSG meningkat menjadi *associate member*.

1.3. Rumusan Masalah

Sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki rumusan masalah untuk mempermudah dalam proses analisa terhadap objek penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Manfaat perumusan masalah adalah untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan sehingga memungkinkan untuk dapat diteliti. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam skripsi ini, yaitu:

Mengapa Melanesian Spearhead Group (MSG) Meningkatkan Status Indonesia dari Observer menjadi Associate Member?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan *Melanesian Spearhead Group* atau MSG meningkatkan status Indonesia dari yang sebelumnya adalah *observer* menjadi *associate member*.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sangatlah penting sebagai landasan berpikir bagi penulis untuk menganalisa suatu permasalahan secara lebih mendalam dan membantu penulis dalam menyusun argumen utama. Kerangka konseptual merupakan sekumpulan konsep dan teori yang menjadi pedoman dalam menentukan variabel yang akan dianalisa. Konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena

yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun & Effendi, 1989:34). Lebih lanjut Marton mengungkapkan bahwa, “Konsep merupakan definisi dan apa yang perlu diamati; konsep menentukan antara variabel empiris” (Koentjaraningrat, 1997:21). Sedangkan teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi, atau sebagai upaya untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi (Mas'ood, 1990:219).

Berdasarkan pemaparan diatas, teori maupun konsep sangat diperlukan untuk menganalisis mengapa MSG meningkatkan status keanggotaan Indonesia dari *observer* menjadi *associate member*. Dalam skripsi ini, teori dan konsep yang digunakan penulis adalah Neoliberal Institusionalisme dan *Bargaining Politics*.

1.5.1. Neoliberal Institusionalisme

Neoliberal institusionalisme merupakan teori hubungan internasional yang dikembangkan dari teori liberalisme. Neoliberal institusionalisme muncul sebagai kritik atas kegagalan teori realisme dan neorealisme dengan menganggap bahwa realisme dan variannya gagal memprediksikan berakhirnya secara damai Perang Dingin serta perubahan drastis yang terjadi pada pasca Perang Dingin. Neoliberal institusionalisme dapat dianggap sebagai upaya untuk menjelaskan perkembangan ekonomi politik global yang meningkat cepat setelah 1945, dengan fokus perhatian pada peran sentral lembaga dan organisasi dalam politik internasional. Para pemikir neoliberal institusionalisme memiliki pendapat bahwa institusi internasional memiliki peran penting dalam menciptakan kerja sama antarnegara (Ashari, 2015:312). Teori ini mengacu pada konsep rasionalitas, dan memfokuskan perhatiannya pada peran sentral lembaga dan organisasi dalam politik internasional. Teori ini berasumsi bahwa ditengah konstelasi dunia yang semakin terglobalisasi, maka potensi kerja sama perlahan-lahan akan menggeser situasi dunia yang konfliktual (Ceadel, 2009:2-3).

Karya Robert Keohane (1982) dan Stephen Krasner (1983) sangat berpengaruh dalam perkembangan teori ini. Ide-ide mereka berkembang berdasarkan pengamatan bahwa pola kerja sama ekonomi internasional relatif stabil meskipun distribusi yang relatif tidak merata dari kekuatan ekonomi internasional. Keohane merefleksikan asumsi mengenai prinsip dasar neoliberal institusionalisme yang menegaskan mengenai keberadaan aktor non negara dalam sebuah sistem. Berbeda dari teori liberal yang mendasarkan negara sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional, dalam neoliberal institusionalisme aktor yang berasal dari non negara akan tetapi masuk ke dalam sebuah sistem yang dibangun negara misalnya organisasi internasional, LSM, NGO juga merupakan aktor penting dalam hubungan internasional.

Teori neoliberal institusionalisme disusun berdasarkan asumsi yang hampir sama dengan neorealisme tetapi berbeda dalam hal *output* yang dihasilkan. Sama dengan neorealisme, neoliberal institusionalisme juga melihat anarki sebagai karakteristik utama hubungan internasional. Meskipun demikian teori ini menambahkan bahwa anarki dapat dihilangkan melalui pembentukan institusi internasional yang kuat (Ashari, 2015:12). Hal ini karena lingkungan politik dan ekonomi internasional sangat dilembagakan, dan organisasi internasional (IOS) memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam dunia internasional. Selain itu neorealisme berpendapat negara-negara berusaha mendapatkan *relative gains* melalui konflik, sedangkan neoliberal institusionalisme berpendapat bahwa negara-negara berusaha mendapatkan *absolute gains* dari kerjasama (Daddow, 2009:98). *Absolute gains* atau keuntungan absolut adalah suatu negara menerima keuntungan yang didapatkan apa adanya dari berkerja sama. Neoliberal institusionalisme memandang keuntungan dari kerja sama tersebut absolut didapat setiap negara meski tidak mungkin kedua negara mendapatkan keuntungan

yang sama besar. Namun teori ini memastikan setidaknya keuntungan akan diraih bagi negara yang dapat melakukan kerja sama (Powell, 1991:1303-1305).

Neoliberal institusionalisme membenarkan adanya potensi konflik antarnegara namun juga menambahkan kuatnya potensi kerja sama melalui dibentuknya institusi-institusi internasional. Neoliberal institusionalisme melihat distribusi kekuatan internasional sebagai pola faktor pendorong utama dalam kerja sama internasional. Mereka berkonsentrasi pada hubungan transnasional dan menolak asumsi realisme bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang penting dalam dunia internasional. Meskipun negara merupakan aktor yang dominan, faktor *non-state actors* juga memiliki peranan yang penting dalam sistem internasional pada teori neoliberal institusionalisme, sehingga neoliberal institusionalisme mempercayai bahwa institusi dan interdependensi mengarah kepada proses kerjasama yang sempurna dalam hubungan internasional (Jones, 2007).

Perspektif neoliberal institusionalisme bergantung pada asumsi rasionalitas. Asumsi rasionalitas adalah asumsi inti dari teori neoliberal institusionalisme yang menyatakan bahwa negara-negara menghitung biaya dan manfaat dari berbagai tindakan yang berbeda dan memilih tindakan yang memberi mereka hasil yang memberikan keuntungan tertinggi bagi negara tersebut. Asumsi rasionalitas memungkinkan teori untuk mengembangkan model yang jelas dan prediksi tentang pola perilaku dari aktor internasional. Asumsi ini juga cukup fleksibel untuk memungkinkan variasi substansial dalam pertimbangan yang masuk ke dalam keputusan negara. Sebagai contoh pengambilan keputusan rasional dapat mencakup bermacam-macam preferensi yang sangat berbeda: beberapa negara mungkin lebih didorong oleh keuntungan ekonomi, sementara yang lain lebih didorong oleh pertimbangan keamanan (Martin, 2007:112). Asumsi rasionalitas juga memungkinkan pelaku untuk memilih antara rencana jangka pendek/langsung dengan rencana jangka panjang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Rencana

yang dipilih tergantung pada keadaan aktor-aktor yang bersangkutan. Asumsi rasionalitas menuntun aktor untuk fokus pada menyusun strategi dengan memperhitungkan bagaimana tindakan mereka akan menyebabkan reaksi dari aktor lain. Reaksi dari aktor-aktor lain tersebut akan mempengaruhi hasil akhir dari rencana tersebut yang bergantung pada interaksi dari beberapa strategi negara.

Alasan MSG menjadikan Indonesia sebagai *associate member* karena didorong berbagai faktor, dan faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Dengan menjadikan Indonesia sebagai *associate member*, maka akan semakin mendekatkan Indonesia yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Mengacu pada pernyataan neoliberal institusionalisme bahwa aktor non-negara juga merupakan aktor penting dalam hubungan internasional dan prinsip *absolute gain* bahwa keuntungan akan didapatkan bagi aktor-aktor internasional yang menjalin hubungan kerja sama, dengan semakin mendekatnya Indonesia kepada negara-negara Melanesia akan menjadi keuntungan sendiri bagi MSG di bidang ekonomi, seperti peningkatan bantuan internasional dan kerja sama dengan Indonesia. Karena itulah dengan mempertimbangkan reaksi dari Indonesia, MSG meningkatkan status Indonesia yang semula *observer* menjadi *associate member*.

1.5.2. Bargaining Politics

Bargaining atau tawar-menawar adalah fitur utama dari hubungan internasional. Hal ini karena *bargaining* merupakan aktivitas saling ketergantungan yang merupakan strategi sentral dari sebuah pengambilan keputusan. *Bargaining* melibatkan tindakan saling bergantung antar sesama pelaku negosiasi. Artinya keputusan yang dibuat oleh satu pelaku akan tergantung dari seberapa besar tingkat keputusan yang akan atau mungkin dibuat oleh aktor lain (van der Windt, 2011:61).

Proses *bargaining* dalam hubungan internasional merupakan hal yang kompleks dan dalam bargaining, topik yang mempengaruhi keputusan atau

penawaran suatu aktor meliputi bidang sejarah, ekonomi, ilmu politik dan hubungan internasional. Ukuran konvensional kekuasaan dari suatu aktor (kekuatan fisik maupun sumber daya keuangan) merupakan hal yang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu daya tawar. Isu-isu seperti kredibilitas, tingkat-tingkat dari penawaran, kemungkinan adanya pemaksaan, informasi yang asimetris, *indivisibility issue*, masalah komitmen, bias politik, dan konteks sosial, semua merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi hasil dari *bargaining*.

Hal-hal yang mempengaruhi proses *bargaining* tersebut yang kemudian menjadikan MSG mengangkat status Indonesia menjadi *associate member*. Hal ini karena beberapa anggota MSG tidak setuju dengan mendekatnya MSG dengan Indonesia. Walaupun begitu Indonesia sendiri telah berjasa membantu MSG dalam mengangkat permasalahan kemerdekaan rakyat Kanak di Kaledonia Baru ke sidang PBB pada masa awal MSG berdiri (Hamid, 1996:7). Indonesia sendiri juga merupakan salah satu negara pendonor di kawasan Melanesia dan negara di luar kawasan Pasifik Selatan yang menjalin kerja sama dengan negara-negara Melanesia. Dengan mempertimbangkan aspek sejarah dan ekonomi tersebut kemudian MSG melakukan *bargaining* dengan Indonesia dan meningkatkan status Indonesia menjadi *associate member*.

1.6. Argumen Utama

Alasan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) meningkatkan status Indonesia yang semula *observer* menjadi *Associate Member* adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai *associate member*, maka MSG akan semakin mendekati Indonesia kepada negara-negara anggota MSG. Dengan semakin dekatnya Indonesia kepada negara-negara MSG, maka bantuan dan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara MSG juga akan semakin meningkat. Selain itu,

peningkatan status Indonesia menjadi *associate member* merupakan sebuah bentuk *bargaining* dari MSG terhadap Indonesia dengan menjadikan *The United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) sebagai *observer* yang merupakan tuntutan dari beberapa anggota MSG yang lebih mendukung ULMWP daripada Indonesia untuk bergabung ke dalam MSG. Untuk menjaga kerja sama dengan Indonesia, MSG meningkatkan status Indonesia dari *observer* menjadi *associate member*. Dengan menaikkan status Indonesia dari *observer* menjadi *associate member* dan hanya menjadikan ULMWP menjadi *observer*, Indonesia tidak akan berkeberatan terhadap bergabungnya ULMWP ke MSG karena statusnya yang lebih rendah dari Indonesia sehingga MSG tidak akan kehilangan kerja sama dengan Indonesia yang sangat penting bagi negara-negara Melanesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah untuk memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penggunaan mode penelitian dalam penulisan karya ilmiah adalah untuk memperoleh data-data penelitian yang dibutuhkan agar karya ilmiah yang disusun menjadi sistematis, kronologis, dan ilmiah. Metode penelitian yang dipilih penulis melingkupi pengumpulan data dan analisis data sebagai hasil akhir.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, digunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data. Teknik ini tidak mengharuskan penulis untuk melakukan observasi lapang akan tetapi cukup merujuk pada informasi-informasi yang sudah ada dari hasil penelitian lain yang dianggap relevan terhadap isu atau fenomena yang akan dianalisa. Data-data dan informasi yang dikumpulkan dalam

teknik penelitian ini merupakan jenis data atau informasi sekunder. Untuk memperoleh data yang valid dan juga mencukupi, maka digunakan beberapa sumber informasi dari:

Tempat:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Sumber Literatur:

1. Buku, Artikel, dan Jurnal
2. Media Internet

1.7.2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang fenomena yang diteliti yang tidak dapat dijelaskan atau dianalisa dengan metode statistik. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat atas data dan fakta yang telah terkumpul untuk diteliti dengan melakukan pemilahan data, pengkajian dan interpretasi terlebih dahulu. Dengan metode kualitatif, penelitian dapat dilakukan dengan menganalisis setiap fenomena hubungan internasional yang terjadi.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 5 bab dan di dalam masing-masing bab terdapat sub-bab sebagai usaha untuk membuat rincian dari penjelasan setiap bab, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan yang terdiri dari batasan materi dan batasan waktu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Gambaran Umum Melanesian Spearhead Group (MSG)

Bab 2 menjelaskan tentang gambaran umum dan perkembangan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bab 3 Perkembangan Kerja sama antara *Melanesian Spearhead Group* dan Indonesia

Bab 3 menjelaskan dinamika kerjasama antara Melanesian Spearhead Group dengan Indonesia dari waktu ke waktu sejak awal bergabungnya Indonesia menjadi *observer* sampai perubahan status Indonesia menjadi *associate member Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Bab 4 Alasan *Melanesian Spearhead Group* Menjadikan Indonesia sebagai Associate Member

Bab 4 merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ditujukan pada karya ilmiah ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alasan dari Melanesian Spearhead Group menjadikan Indonesia sebagai *Associate member*.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini berisi hasil pengujian argumen utama yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai *Melanesian Spearhead Group*. *Melanesian Spearhead Group* atau MSG merupakan organisasi regional yang berdiri di kawasan Melanesia. Melanesia sendiri merupakan salah satu dari gugus kepulauan utama dari sebuah wilayah regional yang dikenal sebagai Pasifik Selatan. Karena itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang *Melanesian Spearhead Group*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang wilayah Pasifik Selatan dan kawasan Melanesia.

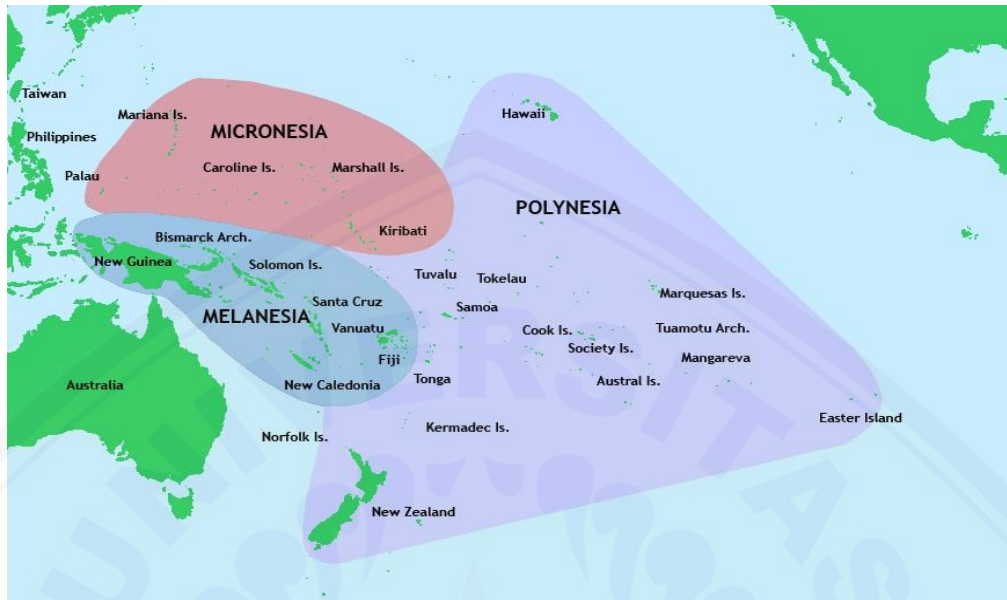
2.1. Gambaran Umum Kawasan Melanesia

Kawasan Melanesia merupakan salah satu wilayah sub-regional dari kawasan Pasifik Selatan. Wilayah Pasifik Selatan atau dikenal juga dengan nama Oceania merupakan sebuah wilayah regional yang terletak di tengah Samudera Pasifik, terletak antara pantai tenggara Asia dan pantai barat benua Amerika. Sebagian besar wilayah Pasifik Selatan terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil, selain Australia dan Papua Nugini, dan tersebar mulai dari 47° LS sampai 30° LU, dan dari 150° BT hingga 100° BB (Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1992, hal. 30). Batas wilayah Pasifik Selatan adalah Kepulauan Hawaii di sebelah utara, Pulau Paskah di sebelah timur, Selandia Baru di sebelah selatan, dan Papua Nugini di sebelah barat. Pasifik Selatan merupakan wilayah dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah Antartika. Pasifik Selatan terdiri dari beberapa negara dan teritori yang terbagi dalam tiga gugus kepulauan utama. Pembagian tersebut berdasarkan wilayah budaya dan/atau kelompok etnografi di wilayah Pasifik Selatan (Hanlon, 1998:1).

Tetapi dewasa ini wilayah Australasia (Australia dan Selandia Baru) juga termasuk dalam wilayah Pasifik Selatan. Hal ini karena sejumlah ahli geografi menggunakan istilah Pasifik Selatan atau Oseania untuk menamakan suatu wilayah

yang mencakup Australia, Selandia Baru, Hindia Timur, dan semua kepulauan yang berada di Samudera Pasifik, kecuali Jepang. Selain itu beberapa provinsi di Indonesia seperti Maluku, Papua dan Papua Barat juga dianggap sebagai bagian dari wilayah Pasifik Selatan. Hal ini karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (DPR-RI, 2001), Provinsi Indonesia bagian timur termasuk dalam kawasan Pasifik Selatan karena kesamaan ras penduduk asli wilayah timur Indonesia dengan Pasifik Selatan. Australia adalah satu-satunya negara kontinental di Pasifik Selatan, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia. Sebagian besar negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan negara-negara yang baru merdeka, seperti Samoa Barat yang merdeka pada tahun 1962 dan Kepulauan Cook yang merdeka pada tahun 1965.

Pasifik Selatan merupakan kawasan beriklim tropis dengan beberapa variasi. Beberapa pulau di Kepulauan Solomon misalnya, terdapat daerah yang sangat panas, sedangkan di tempat lainnya cukup normal suhunya. Wilayah-wilayah lainnya di Pasifik Selatan iklimnya cukup hangat karena tiupan angin, seperti di Fiji, Vanuatu, Guam, Samoa Barat, dan lain-lain. Selain itu, selama musim hujan wilayah Pasifik Selatan menjadi hangat dan lembab.



Gambar 2.1. Peta Pasifik Selatan Menurut Pembagian Ethno-Cultural

Sumber: New World Encyclopedia. 2015. *Melanesia*. diakses dari <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Melanesia> pada tanggal 07 Januari 2017.

Melanesia merupakan salah satu dari sub-kawasan wilayah Pasifik Selatan. Sebagian wilayah Melanesia merupakan bagian dari Indonesia dan memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia. Kata Melanesia berasal dari kata *melas* atau *mela* yang berarti hitam, dan *nesos* atau *nesoi* yang berarti pulau. Terminologi Melanesia pertama kali digunakan pada tahun 1832 oleh Jules Dumont d'Urville untuk membedakan penyebutan secara kultural dengan Polynesia (Wardhani, 2015:12).

2.1.1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Melanesia merupakan wilayah yang terluas di kawasan Pasifik Selatan. Terletak di selatan garis Khatulistiwa, Melanesia memiliki kawasan seluas 7.030.858 Km² termasuk lautannya, dan memiliki luas daratan 540.020 km² (tidak termasuk kawasan Papua) (Hamid, 1996:10). Melanesia membentang dari Pasifik Barat sampai ke Laut Arafura, utara dan timur laut Australia, terdiri dari 2000 pulau

dan memiliki penduduk sebanyak 12 juta. Wilayah Melanesia dibatasi oleh garis bebatuan andesit dengan Polynesia di timur dan Micronesia di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan Melanesia berbatasan dengan Australia. Pulau terbarat dari Melanesia adalah New Guinea yang merupakan pulau terbesar dari seluruh pulau yang ada di kepulauan pasifik. Bagian barat New Guinea adalah salah satu wilayah Indonesia, yaitu Papua. Bagian timur dan selatan New Guinea terdapat negara Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji.



Gambar 2.2. Peta Kawasan Melanesia

Sumber: Sumber: New World Encyclopedia. 2015. *Melanesia*. diakses dari <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Melanesia> pada tanggal 07 Januari 2017.

Secara politik, wilayah Melanesia terdiri dari empat negara merdeka, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Tetapi secara geografis wilayah Melanesia terdiri dari Fiji, Papua New Guinea / Papua Nugini, Solomon Island / Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan New Caledonia / Kaledonia Baru yang merupakan wilayah dependensi Prancis. Beberapa ahli juga menganggap bahwa negara Timor Leste juga merupakan bagian dari kawasan Melanesia. Selain itu lima provinsi dari Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat juga termasuk dalam kawasan Melanesia karena penduduk asli kelima provinsi tersebut merupakan ras Melanesia.

Luasnya pulau-pulau di wilayah Melanesia menunjukkan bahwa wilayah Melanesia kaya akan sumber daya alam. Walaupun dikelilingi oleh lautan, sumber alam yang berada di wilayah Melanesia sangatlah beragam dan tidak hanya berasal dari lautan. Beberapa contoh sumber daya alam di Melanesia adalah pertambangan tembaga, emas, minyak bumi, dan uranium. Selain dari lautan dan pertambangan, sumber daya alam di wilayah melanesia juga berasal dari hutan, khususnya Papua Nugini yang memiliki wilayah hutan yang paling luas di kawasan Melanesia.

2.1.2. Masyarakat Melanesia

Secara historis, penduduk Melanesia merupakan keturunan dari masyarakat Austroloid yang bermigrasi dari Australia dan sebagian Asia Tenggara 50.000-30.000 tahun yang lalu ke wilayah Melanesia (Wardhani, 2015:18). Masyarakat Austroloid merupakan penduduk yang pertama kali menempati Pasifik Selatan, khususnya Melanesia, dan merupakan nenek moyang dari penduduk melanesia yang berbahasa Papua saat ini. Ciri-ciri penduduk asli Melanesia tersebut adalah berkulit gelap, berbadan tegap, berambut hitam dan keriting.

Selain ras Austroloid, ras Austronesia yang berkulit lebih terang juga bermigrasi dari Taiwan ke wilayah Pasifik Selatan lebih dari 3000 tahun yang lalu dan bermukim di Fiji. Masyarakat Austroloid ini kemudian dikenal sebagai masyarakat Polinesia karena mayoritas bertempat tinggal di wilayah Polinesia. Selain penduduk asli Melanesia, terdapat pendatang-pendatang yang berasal dari negara-negara lain seperti negara-negara Eropa, India, Cina, dan negara-negara lainnya yang sebagian besar datang pada saat masa kolonialisasi. Penduduk-penduduk imigran tersebut sebagian besar menetap di kawasan timur Melanesia seperti di Kaledonia Baru dan Fiji dimana jumlah penduduk imigran di negara tersebut melebihi jumlah penduduk aslinya.

Mayoritas penduduk Melanesia, terutama di Papua Nugini, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon merupakan penduduk asli atau penduduk pribumi Melanesia. Kelompok-kelompok etnis dan ras lainnya, seperti Mikronesia, Polinesia, Cina, Vietnam, dan Eropa hanyalah minoritas, populasinya hanya berkisar antara 0.1-4%. Sedangkan di Fiji yang penduduk aslinya minoritas, populasi penduduk aslinya hanya sekitar 46%. Penduduk yang mayoritas merupakan pendatang dari India, yaitu sekitar 49%. Sisa sebanyak 5% merupakan penduduk pendatang yang berasal dari Eropa, Cina, penduduk Pasifik lainnya, dan lain-lain. Kaledonia Baru yang penduduk aslinya juga minoritas sama dengan Fiji jumlah penduduk asli Kanak hanya 42,5%, sedangkan yang lainnya adalah keturunan kaum pendatang, seperti Perancis (37,1%), Wallis (8,4%), Polinesia (3,8%), Indonesia (3,6%), Vietnam (1,6%), dan lain-lain (3%) (Hamid, 1996:23).

Bahasa yang digunakan di wilayah Melanesia sebagian besar adalah bahasa Pidgin dan bahasa Motu. Bahasa Pidgin adalah bahasa yang paling sering digunakan dikarenakan bahasa Pidgin memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa asli di negara-negara kawasan Melanesia, sedangkan bahasa Motu merupakan bahasa sehari-hari negara Papua Nugini yang merupakan negara yang memiliki wilayah terluas di kawasan Melanesia walaupun bahasa resmi Papua Nugini sendiri adalah bahasa Pidgin. Jumlah bahasa di Melanesia sendiri adalah 1319 bahasa. Penyebaran bahasa yang terbesar adalah di Papua Nugini yang memiliki 700 bahasa, lalu Vanuatu yang memiliki 110 bahasa, dan Kepulauan Solomon yang memiliki 120 bahasa. Bahasa-bahasa negara kolonial Inggris dan Prancis juga sering digunakan di wilayah Melanesia dan merupakan bahasa resmi di beberapa negara Melanesia, seperti Fiji yang menjadikan bahasa Inggris sebagai satu-satunya bahasa resmi. Selain itu terdapat pula bahasa-bahasa lain yang dibawa oleh kaum Imigran ke wilayah Melanesia (Hamid, 1996:13-14).



Gambar 2.3. Masyarakat Melanesia dan Persebarannya

Sumber: West Melanesia. 2015. *Melanesia & The Melaneseans*. diakses dari www.westmelanesia.com pada tanggal 07 Januari 2017.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Melanesia

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sumber daya alam di kawasan Melanesia sangat beraneka ragam. Keaneka ragaman sumber daya alam ini sebagian besar telah memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat Melanesia. Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan Melanesia memiliki sumber daya alam terbanyak dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Papua Nugini. Dalam sektor tambang misalnya Papua Nugini memiliki sumber-sumber tambang emas, tembaga, minyak bumi, dan bahkan Uranium. Selain itu terdapat penghasilan dari sektor kehutanan berupa kayu, kopi, dan lain-lain.

Sementara itu Fiji lebih menekankan perekonomiannya pada sektor industri, khususnya industri gula. Hal ini karena dibandingkan negara-negara Melanesia lainnya, Fiji yang lebih unggul dalam sektor Industri. Tetapi walaupun begitu, Fiji

tidak hanya mengandalkan perekonomiannya pada sektor industri semata. Terdapat sektor-sektor perekonomian lain seperti pertambangan emas, kayu, dan ikan tuna. Sedangkan Kaledonia Baru mengandalkan produksi nikelnya yang menempati kedudukan nomor tiga di dunia sebagai sektor utama perekonomian di negaranya. Tetapi walaupun begitu sektor perkebunan di Kaledonia Baru juga cukup membantu perekonomian masyarakat negara tersebut. Sementara itu berbeda dengan negara-negara Melanesia lainnya, sumber-sumber alam di Kepulauan Solomon dan Vanuatu sangatlah sedikit. Kepulauan Solomon masih mengandalkan perekonomiannya pada perikanan, kayu, dan kopra, begitu pula dengan Vanuatu yang mengadakan sektor perekonomiannya pada pertanian dan perikanan.

Sumber-sumber kekayaan laut yang dimiliki oleh negara-negara melanesia sangatlah banyak dan beraneka ragam karena luasnya wilayah perairan Melanesia, yaitu sekitar 6 juta Km² (Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1992:30). Namun demikian karena keterbatasan teknologi maritim yang dimiliki oleh negara-negara Melanesia, kekayaan laut tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, negara-negara Melanesia maupun negara-negara Pasifik Selatan lainnya bekerja sama dengan negara-negara di luar kawasan untuk dapat memanfaatkan kekayaan laut di wilayah tersebut. Selain kelautan, negara-negara Melanesia juga mengembangkan sektor industri pariwisata sebagai pendapatan negaranya. Namun demikian sektor pariwisata di negara-negara Melanesia seperti hotel, resort, dan lain-lain lebih banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari negara luar, yang kepemilikannya berkisar antara 60% sampai 100% (Wardhani, 2015:84).

2.1.4. Kepemerintahan di Melanesia

Kawasan Melanesia terdiri dari negara-negara dengan berbagai bentuk pemerintahan yang tidak terlepas dari sejarah terbentuknya negara tersebut. Sejumlah negara telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri, diantaranya Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu. Sedangkan Kepulauan Solomon merupakan negara yang dulu

dijajah Inggris dan sekarang menjadi anggota merdeka dalam kelompok Persemakmuran Inggris. Kepulauan Solomon memiliki pemerintahan sendiri, namun kedudukan kepala negara tetap berada di tangan Ratu Inggris yang diwakili oleh gubernur jenderal (Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1992:38). Bentuk pemerintahan lain di kawasan Melanesia adalah wilayah seberang lautan atau juga disebut wilayah dependensi. Wilayah dependensi adalah wilayah yang karena suatu hal tidak meraih kemerdekaan atau kedaulatan seperti layaknya sebuah negara. Negara dengan sistem pemerintahan ini di kawasan Melanesia adalah Kaledonia Baru yang merupakan wilayah dependensi atau wilayah seberang lautan negara Perancis.

Walaupun secara formal wilayah-wilayah di Melanesia memiliki kepala pemerintahan, namun peran pemimpin tradisional masih tetap dianggap penting di banyak kawasan, terutama di pedesaan. Bagi warga desa, kepala desa memiliki peran yang berarti terutama dalam menangani masalah-masalah lokal. Jabatan kepala desa ada yang diperoleh berdasarkan hasil pemilihan dan ada pula yang berdasarkan keturunan. Pada hampir semua pulau di Melanesia, setiap desa atau kelompok desa memiliki sebuah dewan hasil pemilihan, yang dapat mengambil keputusan untuk masalah-masalah lokal yang dianggap penting.

2.2. Gambaran Umum *Melanesian Spearhead Group*

2.2.1. Sejarah Terbentuknya *Melanesian Spearhead Group*

Perkembangan organisasi regionalisme di kawasan Melanesia, atau di kawasan Pasifik Selatan pada umumnya, dimulai dengan berdirinya *South Pacific Commission* (SPC) yang didirikan pada tahun 1947 jauh sebelum negara-negara Pasifik Selatan merdeka. SPC merupakan organisasi non-politik yang mewakili suara-suara dari negara-negara menguasai negara-negara di Pasifik Selatan pada masa itu, yaitu Australia, Belanda, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia

Baru. Lalu pada tahun 1971, berdiri organisasi regional yang beranggotakan negara-negara Pasifik Selatan dan bukan negara kolonial, yaitu *South Pacific Forum* (SPF) yang kemudian berganti nama menjadi *Pacific Island Forum* (PIF) sampai sekarang (Wardhani, 2015:191-193).

Seiring waktu peranan PIF mengalami penguatan karena berkembangnya isu-isu global yang Pasifik Selatan tidak luput dari perkembangan isu-isu tersebut. Tetapi walaupun bertambah kuat, laju perkembangan isu-isu global melebihi laju kemampuan PIF dalam mengatasinya. PIF lebih disibukkan oleh konflik dan ketegangan yang terjadi di beberapa negara anggotanya dan menjadikan PIF sebagai organisasi regional masih belum mampu menjadi wadah aksi kolektif bagi keseluruhan anggotanya. Ketidakpuasan anggota-anggota PIF tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan lahirnya organisasi-organisasi di kawasan sub-regional di Pasifik Selatan. Salah satunya organisasi sub-regional tersebut adalah *Melanesian Spearhead Group*.

Melanesian Spearhead Group atau MSG merupakan organisasi regional/sub-regional di kawasan Melanesia yang didirikan di Port Vila pada tanggal 14 Maret 1988, tetapi rencana pembentukan awal MSG terjadi pada sebuah pertemuan informal pada tahun 1986. Walaupun bersifat informal namun pertemuan tersebut mencerminkan sebuah manifestasi penting ideologi Melanesianisme dalam politik kawasan yang telah cukup lama berkembang. Anggota pendiri MSG berusaha memanfaatkan semangat solidaritas antara negara-negara Melanesia yang baru merdeka, dengan blok sub-regional berfungsi sebagai sarana untuk membebaskan negara-negara Melanesia dari kolonialisme barat (Pacific Institute of Public Policy, 2008).

MSG didirikan oleh kepala pemerintahan dari tiga negara Melanesia, yaitu Perdana Menteri Papua Nugini Pias Wingti, Perdana Menteri Vanuatu Walter Lini,

dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Yehezkiel Alenia, dan perwakilan dari gerakan pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru yang bernama *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS). Negara-negara anggota terus membuat pernyataan publik mengenai dukungan politik untuk gerakan pro-kemerdekaan, terutama yang berkaitan dengan populasi Melanesia di Papua Barat dan Kaledonia Baru. FLNKS memiliki status pengamat pada pertemuan MSG dan baru menjadi anggota resmi pada tahun 1989. Kehadiran kelompok politik seperti FLNKS merupakan hal yang tidak biasa dalam organisasi regional. Hal ini karena bergabungnya kelompok etnis tersebut mencerminkan akar sejarah dan politik dari MSG yang didasari oleh semangat budaya dengan komitmen untuk membantu sesama bangsa Melanesia yang dianggap masih dibawah kolonialisme. Pandangan politik bangsa Melanesia tersebut yang kemudian disebut dengan “*The Melanesian Way*” yang dikenal lewat serangkaian artikel yang ditulis oleh intelektual Papua Nugini Bernard Narokobi yang dipublikasikan di harian Post-Courier antara tahun 1976-1978 (Wardhani, 2015:195).

Pembentukan MSG sendiri tidak berarti bahwa negara-negara anggota MSG memisahkan diri dari *Pacific Island Forum*. Dalam hal ini, negara-negara Melanesia menyatakan bahwa formalisasi ikatan mereka dalam bentuk MSG tersebut dimaksudkan untuk lebih memberi arti pada perjuangan mereka dalam bekerja sama dan melalui organisasi-organisasi regional yang ada. Oleh karena itu, PIF selalu memberikan tekanan-tekanan tertentu, bahkan mengecam, terhadap lambatnya proses dekolonisasi di Kaledonia Baru dan mendukung perjuangan rakyat Kanak melalui organisasi FLNKS, dalam setiap hasil pertemuan tahunannya.

Fiji kemudian bergabung menjadi *observer* pada tahun 1993 dan diundang menjadi anggota formal KTT Pemimpin MSG pada tahun 1996. Fiji kemudian semakin mengokohkan keanggotaannya di MSG dengan menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group Forum Trade Agreement* (MSG-FTA) pada tahun

1998 (Ministry of Industry Trade and Tourism of Fiji, 2011). Bergabungnya Fiji kedalam MSG memberikan dampak yang signifikan bagi dinamika kerjasama antara negara-negara anggota MSG. Hal ini dikarenakan Fiji dibandingkan negara-negara anggota lainnya merupakan negara yang lebih maju dengan ekonomi berbasis komersial dan industri yang lebih urban, sehingga Fiji bisa lebih memanfaatkan kerjasama ekonomi antar anggota MSG. Selain itu, tanpa Fiji, ruang lingkup untuk keuntungan ekonomi terbatas dikarenakan kecilnya ukuran dan duplikasi industri dalam negeri dan ekspor komoditas negara-negara MSG.

Pasca penandatanganan *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* tahun 2007, Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* didirikan di Port Vila, Vanuatu dan dibuka pada tahun 2008. Pendirian Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* dan gaji direktur jenderal selama tiga tahun awal pembentukan ini mendapat bantuan dana dari Pemerintah Cina dan Uni Eropa yang juga menyediakan dana untuk MSG (May, 2011). Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* dikepalai oleh seorang direktur jenderal yang bertugas selama tiga tahun dan dipilih pada Konferensi Tingkat Tinggi. Cina membiayai gaji Dirjen MSG selama 3 tahun pertama pendirian MSG. Selain itu Uni Eropa juga menyediakan dana bantuan untuk operasional Sekretariat MSG. Dirjen MSG yang pertama terpilih adalah Rima Ravusiro, mantan penasehat Departemen Luar Negeri Papua Nugini.

Pada KTT Melanesian Spearhead Group ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon tanggal 24 Juni 2015 sampai tanggal 26 Juni 2015, keanggotaan MSG semakin bertambah dikarenakan Indonesia menjadi *associate member* dari MSG dan *The United Liberation Movement for West Papua* atau ULMWP yang merupakan gerakan kemerdekaan Papua Barat dijadikan sebagai *observer*. Sebelum menjadi *associate member*, status Indonesia merupakan negara *observer*. Perwakilan dari Indonesia dipilih dari lima provinsi di Indonesia yang warganya memiliki budaya

Melanesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan provinsi Papua untuk mewakili Indonesia di MSG.

Berikut ini merupakan kelima anggota inti dari *Melanesian Spearhead Group*:

a. Papua Nugini

Papua New Guinea atau Papua Nugini merupakan negara terbesar di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan. Papua Nugini terletak di bagian timur pulau Papua yang dahulu dikenal sebagai New Guinea. Bagian barat pulau ini, yang sejak tahun 1962 telah menjadi bagian dari Indonesia dan sekarang menjadi provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan batas wilayah Barat dari Papua Nugini. Bagian timur negara ini dibatasi oleh Kepulauan Solomon, dan di selatan berbatasan dengan Australia (Hamid, 1996:68-69). Papua Nugini memainkan peran penting dalam perpolitikan di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan. Hal ini karena Papua Nugini merupakan salah satu pendiri dari MSG dan merupakan tuan rumah dari KTT MSG pertama tahun 1986. Selain itu wilayah Papua Nugini yang paling luas dan jumlah penduduknya yang paling banyak di Melanesia juga turut mempengaruhi perannya di perpolitikan kawasan Melanesia.

b. Fiji

Fiji merupakan salah satu negara kepulauan di wilayah Melanesia. Fiji merupakan negara Melanesia yang cukup unik, sekalipun masuk ke dalam wilayah budaya Melanesia, namun sebagian penduduknya berbudaya Polinesia. Bahkan budaya Polinesia sangat mewarnai sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat Fiji. Hal ini karena Fiji terletak di persinggungan antara garis budaya Melanesia dan Polinesia (Hamid, 1996:27).

Dalam kerangka Pasifik Selatan, posisi geografis Fiji dapat dipandang sangat strategis. Oleh karena itu beberapa pusat kegiatan regional Pasifik Selatan ditempatkan di Fiji, misalnya *University of the South Pacific* (USP). Selain itu Fiji

sangat penting dalam peraturan politik di Pasifik Selatan dan kawasan Melanesia. Bukan hanya karena letaknya yang berada di persentuhan budaya Melanesia dan Polinesia, sehingga menjadikan Fiji sebagai titik temu dari berbagai masyarakat di Pasifik Selatan, melainkan juga karena Fiji merupakan salah satu pendiri dan pemrakarsa berdirinya *South Pacific Forum* (SPF). Hal ini juga yang menjadikan Fiji sebagai anggota penting dari *Melanesian Spearhead Group* walaupun Fiji bukan termasuk pendiri MSG (Emslie, 2015:102-103).

c. Vanuatu

Vanuatu merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Melanesia. Kata Vanuatu sendiri memiliki arti yaitu 'tanah yang selalu ada'. Vanuatu terdiri dari 83 pulau yang terbentuk di sebuah kepulauan berbentuk Y yang membentang di sekitar 800 kilometer Samudera Pasifik. Pulau terbesar Vanuatu adalah Santo, Malekula, Efate, Ambrym, Erromango dan Tanna. Vanuatu memiliki lingkungan dan budaya yang kaya. Investasi di Kepulauan Vanuatu disambut baik dan ada banyak peluang, terutama di bidang pariwisata, pertanian / kehutanan dan perikanan (Hamid, 1996:131-132).

Vanuatu merupakan anggota MSG yang paling sering menyatakan sikapnya dalam mendukung rakyat Melanesia sejak dari awal kemerdekaannya pada tahun 1980. Konsep *Melanesian Socialism and Melanesian Solidarity* sering disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu pertama yaitu Walter Hadye Lini sebagai kampanye untuk meraih dukungan sesama negara Melanesia agar membantu orang Kanak di New Caledonia, orang Timor Timur (*East Timor*) dan Papua Barat (*West Papua*) dalam berjuang meraih kemerdekaan (Hamid, 1996:152).

d. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon adalah negara kepulauan di kawasan Melanesia yang terletak di sebelah tenggara Papua Nugini. Kepulauan Solomon secara geografis

terfragmentasi dengan enam pulau utama dan ratusan pulau kecil dan ratusan pulau kecil termasuk atol buatan manusia. Pulau-pulau tersebut diliputi oleh hutan hujan tropis dan lereng perbukitannya yang curam diselingi arus sungai, air terjun, dan laguna. Pulau-pulau utama adalah Choiseul, Guadalcanal, Santa Isabel, San Cristobal, Malaita dan New Georgia. Gunung berapi dengan berbagai tingkat aktivitas terletak di beberapa pulau besar, sementara banyak pulau kecil hanya merupakan atol kecil yang tertutup pasir dan pohon palem. Masyarakat Kepulauan Solomon masih mempraktikkan cara hidup tradisional dan lebih memilih untuk menghormati adat dan tradisi lama (Hamid, 1996:107-108).

e. *Front de Liberation National Kanak et Socialiste (FLNKS)*

Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste atau FLNKS adalah sekelompok partai pro-independen di Wilayah Perancis Kaledonia Baru. FLNKS mewakili populasi etnis Kanak (pribumi) yang merupakan populasi yang lebih luas dari sekitar 108.055 orang Melanesia (diperkirakan 44% dari jumlah penduduk 2009). FLNKS didirikan pada tahun 1984 di sebuah kongres berbagai partai politik. Pendukungnya kebanyakan berasal dari penduduk asli Kanak tetapi juga termasuk pendukung dari komunitas etnis lainnya. FLNKS merupakan gabungan dari Partai Kaledonia atau *Union calédonienne (UC)* dan *Nationalist Unions for Independence (UNI)*. UNI sendiri terdiri dari beberapa partai, yaitu *Melanesian Progressive Union*, *Oceanian Democratic Rally*, dan Partai Pembebasan Kanak atau *Parti de libération kanak (PALIKA)* (Sekretariat MSG, 2011).

2.2.2. Tujuan Terbentuknya *Melanesian Spearhead Group*

Saat awal dibentuk *Melanesian Spearhead Group* merupakan organisasi yang membahas isu politik. Dengan didasari oleh semangat “Persaudaraan Melanesia”, MSG dibentuk guna memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Melanesia yang masih terjajah, terutama di Kaledonia Baru. MSG dibentuk berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan untuk memajukan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi

Melanesia, dan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat Melanesia. MSG digunakan oleh negara-negara Melanesia sebagai kelompok “*lobby*” di dalam badan-badan regional, seperti *South Pacific Forum* (SPF) untuk memperjuangkan rakyat Melanesia, khususnya rakyat Kanak di Kaledonia Baru (Somare, 2015:293).

Sementara kerja sama politik antar anggota MSG berevolusi dari waktu ke waktu dan mencakup berbagai macam isu seperti imigrasi, bea cukai dan keamanan, kerjasama perdagangan dan *Melanesian Spearhead Group Forum Trade Agreement* (MSG-FTA) bisa dibidang merupakan instrumen organisasi yang paling terlihat dari MSG. MSG-FTA pertama lahir dari *Leaders Summit* atau KTT MSG di Port Vila, Vanuatu pada tahun 1992 dan ditandatangani di tahun berikutnya di Rabaul, Papua Nugini (Ministry of Industry Trade and Tourism of Fiji, 2011). MSG-FTA mengubah fokus MSG dengan lebih menekankan pada promosi kerjasama ekonomi antara negara anggota MSG daripada permasalahan politik. Selain itu, perjanjian tersebut juga menekankan solidaritas dan penghormatan terhadap budaya dan hak asasi penduduk asli Melanesia.

Menurut perjanjian *free-trade agreement* tersebut tujuan pembentukan *Melanesian Spearhead Group* adalah:

- a. Untuk memajukan dan memperkuat perdagangan, pertukaran budaya, tradisi, nilai-nilai dan kesetaraan kedaulatan negara-negara Melanesia;
- b. Untuk mendorong kerjasama ekonomi dan teknik antar anggota; dan
- c. Untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan anggota MSG dan menyelaraskan tujuan bersama para anggota MSG mengenai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance dan keamanan (Ministry of Industry Trade and Tourism of Fiji, 2011).

MSG-FTA menghasilkan kesepakatan yang menyediakan akses gratis untuk barang dan jasa antar negara anggota. Prinsip panduannya adalah kerja sama perdagangan dan liberalisasi yang lebih besar untuk mendorong persaingan dan efisiensi, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara-negara anggota. Perjanjian perdagangan bebas juga merupakan peluang yang efisien bagi negara-negara eksportir MSG untuk mencapai kesejahteraan di lingkungan yang akrab. Selain itu MSG-FTA juga berisi sebuah komitmen bahwa negara-negara anggota akan saling memberikan status 'negara yang paling disukai' atau '*Most Favoured Nation*' (MFN), yang berarti bahwa setiap konsesi yang diberikan oleh negara MSG ke negara non-MSG akan diteruskan secara otomatis ke tetangga MSG mereka, hal ini untuk memastikan agar negara anggota selalu mendapatkan kemungkinan terbaik dalam perdagangan. Tindak lanjut dari kerja sama antar negara Melanesia ini kemudian diikuti dengan penandatanganan *Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia* di Kiriwina, Papua Nugini, pada tahun 1996 (Forau, 2011).

Prinsip-prinsip dari perjanjian-perjanjian tersebut akhirnya diwujudkan dalam persetujuan pembentukan MSG yang ditandatangani *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* oleh lima pihak pada tanggal 23 Maret 2007. Perjanjian itu mengukuhkan status MSG yang diakui oleh hukum internasional, diikuti dengan pembentukan organisasi dan sekretariat MSG. Sekretariat MSG dibangun di Port Vila, Vanuatu, dengan bantuan dana dari Republik Rakyat Cina dan mulai dibuka secara resmi pada tahun 2008.

Selain itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, MSG juga dibentuk sebagai kelompok "*lobby*" dalam *Pacific Island Forum* (PIF). Meskipun tujuan jelas MSG adalah memperkuat hubungan ekonomi Melanesia melalui perdagangan dan politik melalui berbagai pertemuan, MSG menggalang solidaritas ras Melanesia

dengan keinginan agar suara Melanesia semakin kuat dan diperhitungkan di PIF yang selama ini dipersepsikan telah didominasi oleh Australia dan Selandia Baru.

2.2.3. Struktur Organisasi dan Keanggotaan *Melanesian Spearhead Group*

MSG sebagai sebuah organisasi sub-regional memiliki kantor sekretariat yang berada di Port Vila, Vanuatu. Sekretariat bertanggungjawab pada administrasi dan manajemen urusan *Melanesian Spearhead Group*, pemberi saran kebijakan, serta koordinasi dan bantuan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan oleh konstituen *Melanesian Spearhead Group*. Sekretariat harus memberikan layanan dukungan kepada KTT Pemimpin MSG serta pertemuan badan penyusun MSG lainnya, dan Sekretariat harus berkomunikasi dengan anggota melalui Kementerian Luar Negeri atau titik kontak lainnya yang dapat dicalonkan oleh Anggota masing-masing.

Sesuai dengan paragraf Pasal 15.3 dari *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group (The Melanesian constitution)* yang ditandatangani oleh kelima anggota *Melanesian Spearhead Group* pada tahun 2007, Sekretariat harus:

- a. mempromosikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja;
- b. menetapkan pengaturan kerja dengan organisasi regional dan internasional yang relevan;
- c. meningkatkan pengembangan dan pelatihan ketenagakerjaan;
- d. tunduk pada otorisasi yang tepat, menyebarkan informasi dan data yang relevan kepada Anggota MSG dalam penafsiran dan evaluasi data teknis;
- e. memberi nasihat kepada anggota MSG mengenai masalah dan peluang berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan MSG;

- f. meninjau dan melaporkan secara teratur kemajuan yang dicapai dengan semua proyek yang termasuk dalam program kerja;
- g. melakukan kegiatan lain dan mengikuti prosedur seperti yang dapat ditentukan oleh *Leaders Summit* atau KTT MSG;
- h. bekerja untuk memajukan Prinsip Kesepakatan Kerjasama antara negara-negara merdeka di Melanesia (*the Agreed Principles of Co-operation Among Independent states in Melanesia*) yang ditandatangani oleh para pihak;
- i. memberikan saran teknis mengenai perjanjian perdagangan *the Revised MSG Trade Agreement of 2005* di antara para anggota serta memberikan jalan untuk penyelesaian konflik di antara para anggota;
- j. mempromosikan identitas dan aktivitas Sekretariat; dan
- k. melakukan kegiatan seperti yang diperlukan untuk pencapaian tujuan MSG (Sekretariat MSG, 2007).

Sekretariat MSG berisikan staf yang terdiri dari Direktur Jenderal, Wakil Direktur Jenderal, staf profesional dan staf lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal sesuai dengan struktur perusahaan dan juga Peraturan Staf yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Direktur Jenderal memiliki peran sebagai pejabat tertinggi dari Sekretariat MSG. Direktur Jenderal diangkat oleh KTT MSG dengan syarat dan ketentuan seperti yang dapat ditentukan oleh para pemimpin negara anggota. Direktur Jenderal merupakan anggota *ex-officio* dalam menghadiri pertemuan-pertemuan KTT MSG, Pertemuan Menteri Luar Negeri, Pertemuan Pejabat Tinggi, Rapat Pejabat Perdagangan dan Pejabat Ekonomi, serta Pertemuan Menteri atau komite penasihat teknis atau kelompok lainnya.

Tugas Direktur Jenderal adalah:

- a. bertanggung jawab atas administrasi program kerja dan kegiatan MSG lainnya;

- b. mempersiapkan dan menyerahkan laporan sesi dua tahunan, laporan tentang kegiatan Sekretariat, anggaran tahunan dan rekening sekretariat terakhir pada saat KTT MSG untuk ditinjau dan disetujui;
- c. membuat pengaturan untuk pertemuan KTT MSG dan badan penyusun MSG;
- d. mengatur semua hal yang berkaitan dengan publikasi materi yang dihasilkan oleh Sekretariat;
- e. menunjuk staf profesional dan administratif Sekretariat dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan;
- f. mencari dan menarik sumber dukungan finansial dan teknis yang mungkin untuk proyek sekretariat; dan
- g. melakukan tugas lain yang mungkin diperlukan atau didelegasikan oleh KTT Pimpinan, Pertemuan Menteri Luar Negeri atau SOM dari waktu ke waktu (Bekarekar, 2016:80-81).

Direktur Jenderal memiliki wewenang untuk mengangkat Wakil Direktur Jenderal tetapi dengan syarat harus berkonsultasi dengan Ketua SOM untuk menunjuk seorang Wakil Direktur Jenderal dengan syarat dan ketentuan seperti yang dianggap sesuai. Selain itu, Direktur Jenderal memiliki wewenang untuk dapat menunjuk semua staf lain sesuai dengan peraturan staf, pembentukan staf dan kebijakan remunerasi yang ditentukan oleh KTT Pimpinan. Jika karena alasan apapun jabatan Direktur Jenderal kosong, Wakil Direktur Jenderal dapat ditunjuk oleh ketua Pertemuan Pejabat Tinggi atau *Senior Officials Meeting* (SOM) saat itu, untuk melaksanakan fungsi sebagai Direktur Jenderal secara sementara sampai jabatan tersebut terisi. Direktur Jenderal bertugas selama 3 tahun dan bisa dipilih lagi di konferensi berikutnya namun tidak bisa dipilih lagi seterusnya, sedangkan semua staf profesional lain termasuk Wakil Direktur Jenderal tidak bisa ditunjuk melebihi dua kali masa jabatan (Sekretariat MSG, 2007).

Sedangkan keanggotaan dalam MSG sendiri terdiri dari Anggota Penuh (*Full Members*), Keanggotaan Luar Biasa (*Associate Member*), dan Anggota Peninjau (*Observer*). Anggota penuh merupakan anggota yang ikut serta dalam semua keanggotaan MSG dengan segala hak-haknya. Anggota penuh dari MSG terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan FLNKS. *Associate member* sendiri merupakan anggota organisasi yang mempunyai keanggotaan terbatas dan dapat berpartisipasi namun tidak memiliki hak suara di dalam organisasi. Sedangkan anggota *observer* memiliki status keanggotaan yang lebih terbatas dari *associate member* dan pada umumnya hanya mengikuti kegiatan organisasi ketika menyangkut kepentingannya. Berikut ini merupakan perbedaan hak partisipatif dan kewajiban antara *associate member* dan *observer* dari MSG:

Tabel 2.1. Perbedaan Hak Partisipatif dan Kewajiban antara *Associate Member* dan *Observer* MSG

Hak Partisipatif dan Kewajiban Anggota	<i>Associate Member</i>	<i>Observer</i>
Rapat / Kehadiran di Pertemuan	- <i>Associate Member</i> hanya diperbolehkan menghadiri sesi pembukaan dan pleno dari KTT MSG tetapi tidak diizinkan untuk menghadiri <i>MSG Summit 'Retreat'</i> , yang merupakan pertemuan tertutup untuk anggota saja.	- <i>Observer</i> hanya diperbolehkan menghadiri sesi pembukaan dan pleno dari KTT MSG tetapi tidak diizinkan untuk menghadiri <i>MSG Summit 'Retreat'</i> , yang merupakan pertemuan tertutup untuk anggota saja.
	- <i>Associate member</i> dapat berpartisipasi pada pertemuan resmi MSG yang relevan, termasuk pertemuan pra-KTT dan	- <i>Observer</i> dapat berpartisipasi pada pertemuan resmi MSG yang

	<p>di badan konstituen lainnya atas undangan oleh Direktur Jenderal Sekretariat MSG setelah berkonsultasi dengan anggota MSG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Associate member</i> dapat mundur dari sesi pertemuan di mana isu-isu sensitif dibahas. 	<p>relevan, termasuk pertemuan pra-KTT dan di badan konstituen lainnya atas undangan oleh Direktur Jenderal Sekretariat MSG setelah berkonsultasi dengan anggota MSG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Observer</i> dapat mundur dari sesi pertemuan di mana isu-isu sensitif dibahas.
<p>Presentasi Selama Pertemuan</p>	<p><i>Associate member</i> dapat memberikan pertanyaan atau presentasi jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan oleh Direktur Jenderal Sekretariat MSG, setelah berkonsultasi dengan anggota, diizinkan untuk membuat pernyataan / presentasi atau berkontribusi pada masalah tertentu dalam rapat; atau - Meminta kepada Direktur Jenderal, yang kemudian berkonsultasi dengan anggota penuh MSG, agar diizinkan untuk membuat pernyataan / presentasi atau berkontribusi pada masalah tertentu pada pertemuan. <p>Pernyataan harus dikirim dan</p>	<p>Direktur Jenderal Sekretariat MSG, setelah berkonsultasi dengan anggota, akan mengundang <i>observer</i> untuk membuat pernyataan atau presentasi atau berkontribusi pada masalah tertentu pada pertemuan badan Konstituen, asalkan pernyataan telah dikirim dan diedarkan kepada anggota 1 bulan sebelumnya</p>

	diedarkan kepada anggota 1 bulan sebelumnya.	
Aksesibilitas untuk dokumen	<i>Associate member</i> dapat memiliki akses ke dokumen / informasi rahasia tetapi harus disetujui oleh anggota.	<i>Observer</i> tidak akan diberikan akses ke dokumen / informasi rahasia.
Pengambilan Keputusan	<i>Associate member</i> dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang isu-isu spesifik, setelah disetujui oleh anggota.	<i>Observer</i> tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
Kontribusi	<i>Associate member</i> akan diminta untuk membayar 'Biaya Tahunan <i>Associate Member</i> ' ke Sekretariat; tarif biaya tersebut ditentukan dari waktu ke waktu.	Kontribusi Sukarela
Lain-lainnya	<i>Associate member</i> diharuskan untuk menghormati dan bertindak sesuai dengan perjanjian ' <i>Agreement Establishing the MSG</i> ', visi dan misi bersama dengan tujuan pengembangan MSG.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Observer</i> tidak diizinkan melakukan '<i>political bargaining</i>' dengan MSG. - <i>Observer</i> diminta untuk menghormati dan melindungi kepentingan MSG dan bertindak sesuai dengan semangat perjanjian '<i>Agreement Establishing the MSG</i>'.

Sumber: Sekretariat MSG. 2011. *Membership Issues*. diakses dari <http://msgsec.info/index.php/guidelinesobservership-a-associate-members> pada tanggal 25 Juli 2018.

Anggota yang merupakan *associate member* dari *Melanesian Spearhead Group* adalah Indonesia. Sedangkan observer dari MSG adalah Timor Leste dan *The United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Berikut ini merupakan status keanggotaan dari *member* MSG:

Tabel 2.2. Anggota Melanesian Spearhead Group

Negara	Kepala Pemerintahan	Status
Papua Nugini	Perdana Menteri Peter O'Neill	Negara Berdaulat
Fiji	Perdana Menteri Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama	Negara Berdaulat
Vanuatu	Perdana Menteri Sato Kilman	Negara Berdaulat
Kepulauan Solomon	Perdana Menteri Manasseh Sogavare	Negara Berdaulat
<i>Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste</i> (FLNKS)	Kepala Perwakilan FLNKS Victor Tutugoro	Partai
Indonesia (Diwakili 5 dari 34 Provinsi)	Presiden Joko Widodo	<i>Associate Member</i>
Timor Leste	Presiden Fransisco Guterres	<i>Observer</i>
<i>The United Liberation Movement for West Papua</i> (ULMWP)	Sekretaris Umum ULMWP Octavianus Mote	<i>Observer</i>

Sumber: Sekretariat Melanesian Spearhead Group. 2011. *Brief about MSG*. diakses dari: <http://msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg> pada tanggal 08 Desember 2015.

2.2.3.1. *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP)

Tidak seperti organisasi internasional dan regional pada umumnya MSG memiliki anggota berupa kelompok politik etnis, seperti *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* atau FLNKS. Bergabungnya kelompok etnis ini mencerminkan akar sejarah dan politik dari MSG yang didasari oleh semangat solidaritas etnis dan budaya dengan komitmen untuk membantu membebaskan sesama bangsa Melanesia yang dianggap masih berada dalam kolonialisme. Oleh karena itu MSG menjadikan *United Liberation Movement for West Papua* atau ULMWP sebagai *observer*.

ULMWP merupakan sebuah kelompok politik yang berupaya untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. ULMWP dibentuk pada tanggal 7 Desember 2014 di Vanuatu dan merupakan organisasi gabungan dari *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) dan dua gerakan lain yang juga berusaha untuk melepaskan Papua Barat dari Indonesia, yaitu Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan *the National Parliament of West Papua* (NPWP) (Goisler, 2017). Dalam MSG, ULMWP mewakili masyarakat Papua yang berada di luar negara Indonesia. Hal ini karena Papua Barat telah diwakili keanggotaannya oleh Indonesia di MSG. Anggota dari ULMWP sebagian besar berdomisili di luar wilayah Papua Barat, seperti di Papua Nugini, Australia, Vanuatu, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan juga memiliki paspor negara luar (Siadari, 2016).

2.2.4. Pengambilan Keputusan dalam *Melanesian Spearhead Group*

MSG beroperasi pada lima tingkatan yang diatur dalam aturan-aturan sudah tercantum pada *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group (The Melanesian constitution)* pasal 8-17 (Sekretariat MSG, 2007). Kelima tingkatan tersebut adalah:

- a. KTT Pemimpin (*Leaders Summit*). Pertemuan ini merupakan pertemuan tertutup yang diadakan tiap dua tahun sekali dan dihadiri oleh kepala pemerintahan atau wakil masing-masing negara anggota, perwakilan resmi dari FLNKS. Pengambilan keputusan utama dilakukan melalui KTT ini. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara konsensus. Keputusan-keputusan yang ditentukan dalam KTT tersebut meliputi penerimaan kebijakan umum MSG, penunjukan maupun penghentian Direktur Jenderal Sekretariat MSG, pembentukan Komite Menteri, dan pengesahan atau pengajuan amandemen perjanjian baik pada tingkat *Melanesian Spearhead Group* maupun dengan konstituen. KTT MSG secara bergilir dilakukan di negara anggota yang sedang memegang kepemimpinan. Ketua KTT MSG juga dapat mengundang perwakilan dari lembaga internasional, organisasi akademis dan penelitian, yayasan, dan industri swasta, atau penasihat untuk mengikuti KTT MSG. Contoh KTT MSG ini adalah KTT MSG ke-18 di Fiji pada bulan Maret 2011 dimana MSG pertama kali mengundang Indonesia sebagai *observer*.
- b. Pertemuan Menteri Luar Negeri (*Foreign Ministers Meeting*). Pertemuan ini diadakan tiap tahun dan bertanggung jawab pada penentuan kebijakan umum serta persetujuan anggaran tahunan MSG. Selain itu, pertemuan ini juga berfungsi sebagai pendorong proposal amandemen setiap aturan dan prosedur administratif, serta konstituen. Amandemen hanya boleh diajukan oleh negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*. Sama seperti KTT MSG, keputusan dalam *Foreign Ministers Meeting* juga diambil melalui konsensus, tetapi pada antar sesi pemimpin mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan atas nama anggota terhadap kebijakan mendesak setelah berkonsultasi dengan anggota *Melanesian Spearhead Group*. Segala hal

yang dilakukan pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri akan dilaporkan pada Konferensi Tingkat Tinggi MSG. Contoh dari pertemuan ini adalah *Foreign Ministers Meeting* (FMM) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2012 sampai tanggal 27 Maret 2012 di Suva, Fiji. Pertemuan ini merupakan kedua kalinya Indonesia diundang sebagai *observer*.

- c. Pertemuan Pejabat Tinggi (*Senior Officials Meeting*). Pertemuan ini juga diadakan tahunan bersamaan dengan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (*Foreign Ministers Meeting*) atau ketika diminta oleh pemimpin *Melanesian Spearhead Group*. Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk memberikan arahan kebijakan pada Sekretariat *Melanesian Spearhead Group*, membuat laporan, serta rekomendasi kebijakan pada para pemimpin. Laporan dari pertemuan ini disampaikan pada *Foreign Ministers Meeting*. *Senior* contoh dari pertemuan ini adalah *Officials Meeting* (SOM) yang diadakan di Suva, Fiji pada tanggal 21 Maret 2012 sampai 24 Maret 2012, dan dilaksanakan sebelum *Foreign Ministers Meeting* (FMM).
- d. Pertemuan Pejabat Perdagangan dan Pejabat Ekonomi (*Trade and Economic Officials Meeting*). Pertemuan ini dapat diadakan bersamaan dengan pertemuan lain atau secara khusus sesuai dengan permintaan dari anggota atau pemimpin MSG. Pertemuan ini berperan sebagai pemberian saran teknis dan bantuan pada pelaksanaan atau revisi perjanjian perdagangan *Melanesian Spearhead Group*. Laporan pertemuan ini diberikan pada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (*Senior Officials Meeting*).
- e. Pertemuan Menteri yang dapat diadakan dan komite penasihat teknis atau kelompok lainnya yang mungkin dibentuk dari waktu ke waktu. Pertemuan menteri tersebut bisa berupa misi khusus penanganan

sengketa yang dapat didirikan oleh pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi. Misi khusus dapat didirikan untuk merekonsiliasi konflik yang mungkin terjadi antar anggota *Melanesian Spearhead Group* maupun Anggota *Melanesian Spearhead Group* dengan pihak lain. Selain itu pertemuan- tingkat menteri dan subkomite lain juga mungkin dapat dilakukan jika diperlukan atau dibutuhkan.

Struktur pelaporan MSG adalah sebagai berikut:

- a. Komite Penasihat Teknis harus melapor pada Rapat Pejabat Perdagangan dan Ekonomi atau Pejabat Tinggi sesuai dengan amanatnya;
- b. Rapat Pejabat Perdagangan dan Ekonomi wajib melapor kepada Rapat Pejabat Tinggi;
- c. Rapat Pejabat Tinggi wajib melaporkan kepada Menteri Luar Negeri;
- d. Komite Menteri harus memberikan hasil pertemuan mereka ke Pertemuan Menteri Luar Negeri untuk dikirim ke KTT Pemimpin; dan
- e. Pertemuan Para Menteri Luar Negeri harus melapor langsung ke KTT Pemimpin (Bekarekar, 2016:77-80).

Selain pertemuan-pertemuan yang disebutkan tersebut, terdapat pertemuan lain yaitu KTT khusus antar pemimpin MSG. Pertemuan ini diadakan setahun setelah KTT utama MSG. Contoh dari KTT khusus antar pemimpin tersebut adalah pertemuan KTT Khusus MSG yang diselenggarakan di Suva, Fiji pada tanggal 29 Maret 2012 sampai tanggal 30 Maret 2012. Agenda utama yang dibahas pada KTT Khusus MSG tersebut antara lain adalah peningkatan kerjasama MSG dibidang politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, sosial-budaya, isu lingkungan dan *climate change*, perkembangan isu FLNKS, dan isu-isu kesekretariatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012).

2.2.5. Kegiatan *Melanesian Spearhead Group*

Melanesian Spearhead Group merupakan sebuah organisasi yang pada awal dibentuknya bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Melanesia. Walaupun dewasa ini tujuan tersebut sudah bergeser ke arah perdagangan dan kerjasama antar negara Melanesia, tujuan awal MSG tersebut masihlah diperjuangkan oleh MSG. Sampai sekarang MSG masih memperjuangkan kemerdekaan rakyat Kanak di Kaledonia Baru. Salah satu upaya tersebut adalah di tahun 1986 dimana para anggota pendiri MSG berusaha memasukkan masalah dekolonialisasi Kaledonia Baru ke Sidang Umum PBB. Upaya tersebut memperoleh keberhasilan dimana Komite Dekolonialisasi PBB menghasilkan Resolusi PBB No. 43/53 tahun 1988, dan memasukkan Kaledonia Baru dalam daftar “wilayah yang belum mempunyai pemerintahan” (Hamid, 1996:7)

Upaya lain dari MSG dalam masalah dekolonialisasi Kaledonia Baru adalah Misi MSG ke Kaledonia Baru yang berlangsung dari tanggal 8 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dengan Komite Khusus Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (C24) secara formal mengakui pekerjaan MSG dalam proses dekolonisasi di Kaledonia Baru dengan memasukkan dan mengakui Laporan Misi dalam Rancangan Resolusi mengenai Kaledonia Baru di Majelis Umum PBB di 2011.

Sebagai sebuah organisasi sub-regional, *Melanesian Spearhead Group* memiliki berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan visi, misi, dan tujuan dari MSG itu sendiri. Kegiatan dari *Melanesian Spearhead Group* mencakup Konferensi Tingkat Tinggi antar pemimpin dan pertemuan-pertemuan tingkat dibawahnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi selain KTT dan pertemuan-pertemuan penting lainnya, kegiatan MSG juga mencakup kunjungan kerja ke negara-negara lain yang menjalin kerja sama dengan MSG. Kunjungan ke negara lain tersebut juga sebagai studi banding antara negara yang dikunjungi dengan negara-negara anggota MSG. Salah satu bentuk kunjungan tersebut antara lain adalah

kunjungan delegasi *Melanesian Spearhead Group* ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 2014 sampai tanggal 16 Januari 2014. Kunjungan para menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* ke Indonesia bertema *Promoting Economic Ties and Development Cooperation* (Kogoya, 2014). Pertemuan tersebut juga menghasilkan penanda tangan *Joint Statement* antara Indonesia dengan MSG. *Join Statement* tersebut berisi tentang persetujuan antara MSG dengan Indonesia untuk menghormati dan menghargai kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial masing-masing dan prinsip saling tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, sesuai dengan piagam PBB.

Kegiatan dari *Melanesian Spearhead Group* juga mencakup kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Salah satunya adalah kerjasama dengan *International Union for Conservation of Nature* atau IUCN. IUCN adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan ini didirikan pada tahun 1948 dan berpusat di Gland, Switzerland. IUCN beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non-pemerintah dan ribuan ahli dan ilmuwan dari 181 negara. Tujuan dibentuknya IUCN adalah untuk membantu komunitas di seluruh dunia dalam konservasi alam.

Bentuk kerjasama antara IUCN dengan MSG tersebut adalah penanda tangan sebuah *memorandum of understanding* (MOU) pada tanggal 20 Juni 2014 (IUCN, 2014). Penanda tangan MOU tersebut bertujuan untuk memperkuat dan memformalkan kerjasama antara kedua organisasi tersebut. Kedua organisasi tersebut telah berkolaborasi dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem terestrial dan konservasi dan perumusan dan pengembangan Kerangka Kerja Pengembangan Pertumbuhan Hijau untuk negara anggota MSG.

Selain kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan tersebut, MSG juga melakukan kegiatan untuk melestarikan tradisi dan budaya asli Melanesia mereka. Salah satu contohnya adalah Pertemuan Dewan Seni dan Budaya MSG atau *MSG Council of Arts & Culture Meeting (CACM)*. Pertemuan ini diadakan sebagai upaya untuk perlindungan regional dan pengamanan pengetahuan tradisional dan ungkapan budaya. Salah satu dari pertemuan tersebut adalah *MSG Council of Arts & Culture Meeting* yang diadakan di Kantor Sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu pada bulan Maret 2013. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk untuk mengejar implementasi Perjanjian Kerangka Kerja MSG tentang *MSG Framework Treaty on Traditional Knowledge (TK) and Expressions of Culture (EC)*, dan instrumen kerangka lainnya yang diadopsi oleh Pemimpin MSG (Sekretariat MSG, 2013).

**BAB 3. PERKEMBANGAN HUBUNGAN ANTARA MSG DENGAN
INDONESIA DARI ABAD KE-20 SAMPAI INDONESIA MENJADI
OBSERVER MSG**

Sebagai sebuah organisasi internasional, MSG juga melakukan hubungan dengan aktor-aktor internasional lainnya, baik itu negara maupun organisasi internasional. Salah satunya adalah dengan salah satu negara tetangga dari kawasan Melanesia, yaitu Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdampingan dengan kawasan Melanesia, memiliki kemiripan dengan kawasan Melanesia dibandingkan negara-negara lain yang juga berdampingan dengan kawasan Melanesia seperti Australia dan Selandia Baru. Salah satu kesamaannya adalah Indonesia merupakan negara berkembang sama seperti negara-negara Melanesia. Kesamaan lainnya adalah seperti halnya negara-negara anggota MSG lainnya, adalah sebuah negara kepulauan.

Secara geografis, Indonesia adalah negara yang unik, hal ini dikarenakan Indonesia terletak di persimpangan dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa atau ras, penduduk asli Indonesia terdiri dari bangsa Mongoloid Selatan atau Austronesia, dan Melanesia, yang mana bangsa Austronesia memiliki jumlah terbesar dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Indonesia bagian timur, yang lebih cenderung ke Australia daripada Asia, dihuni oleh 11 juta orang dari budaya Melanesia. Masyarakat Melanesia tersebut tersebar di lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Oleh karena itu, adanya persamaan ras antara negara-

negara kawasan Melanesia dengan Indonesia bagian timur juga menjadi salah satu faktor kerjasama antara MSG dengan Indonesia.

Sebagai sebuah negara, Indonesia telah bekerja untuk membangun hubungan baik dengan semua tetangganya dan untuk mempertahankan lingkungan daerah yang stabil, sejahtera dan aman. Hal ini karena hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara lainnya sangat penting untuk keamanan, pembangunan dan kemakmuran Indonesia sendiri. Tetapi walaupun begitu kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia maupun dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya baru berlangsung sekitar tahun 1970 dan 1980-an. Tetapi walaupun begitu gagasan kerja sama dengan negara-negara dunia ketiga, khususnya negara-negara bagian selatan sudah muncul saat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung. *The Bandung Spirit* yang dilahirkan di konferensi tersebut telah memberikan inspirasi bagi terciptanya suatu model kerjasama yang mampu mendukung pembangunan negara-negara selatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011:1).

3.1. Awal Mula Hubungan *Melanesian Spearhead Group* dengan Indonesia

Secara diplomatik, hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan, khususnya negara-negara Melanesia, tidak berkembang selaju hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena Asia Tenggara menempati urutan prioritas tertinggi dalam lingkaran konsentrasi politik luar negeri Indonesia. Indonesia lebih berperan aktif di kawasan Asia Tenggara. Bahkan kawasan Asia Tenggara semakin menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia ketika *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN berdiri pada tahun 1967 (Hamid, 1996:103-104).

Sejak merdeka, Indonesia tidak memberi perhatian khusus kepada negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini karena Indonesia lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai “Negara Lautan Hindia”, walaupun secara geografis Indonesia juga merupakan bagian dari Samudera Pasifik. Identifikasi diri ini berpengaruh pada cara pandang dan sikap Indonesia terhadap kawasan sekitarnya. Oleh karena itu berbeda dengan kawasan Asia Tenggara, kawasan Pasifik Selatan, khususnya kawasan Melanesia, kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan rakyat Indonesia, walaupun kawasan Melanesia sendiri berbatasan langsung dengan Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia, setidaknya sampai dengan tahun 1980-an, tidak cukup memberi perhatian yang memadai kepada wilayah Pasifik Selatan. Sebagai akibatnya, Indonesia bukanlah menjadi mitra bagi negara-negara di kawasan tersebut sehingga akhirnya muncul perspektif negatif dari negara-negara Pasifik Selatan, khususnya dari negara-negara kawasan Melanesia yang sangat vokal, terhadap Indonesia ketika ada masalah Timor Timur. Keadaan ini yang kemudian menjadi penyebab gangguan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Ketika Sidang Umum PBB pada akhir tahun 1970-an pada saat voting atas tindakan Indonesia yang melakukan invasi pada Timor Timur yang dianggap melanggar hukum, banyak negara-negara Pasifik Selatan yang tidak mendukung atau abstain dalam persoalan integrasi Timor Timur. Akibatnya Indonesia merasa kesulitan dalam posisi diplomatiknya dikarenakan Indonesia menyandang citra negatif di kawasan Pasifik Selatan (Hamid, 1996:104).

Oleh karena itu untuk mengurangi citra buruk Indonesia di negara-negara Pasifik Selatan dan mengurangi dampak negatif dari citra buruk tersebut, Indonesia menjadikan negara-negara Pasifik Selatan menjadi perhatian utama dari politik luar negeri Indonesia. Hal ini kemudian ditetapkan pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1978 (Hamid, 1996:104). Selain untuk memperbaiki citra Indonesia, penetapan ini juga bertujuan untuk menciptakan kestabilan di kawasan

Pasifik Selatan. Hal ini karena kestabilan di kawasan Pasifik Selatan juga mempengaruhi Indonesia sebagai negara tetangga kawasan Pasifik Selatan.

Terdapat berbagai macam bentuk perhatian khusus dari Indonesia kepada kawasan Pasifik Selatan pasca dijadikannya kawasan tersebut menjadi perhatian utama politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah dukungan dari Indonesia terhadap kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980, walaupun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu baru terjalin setelah ditandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1995. Selain itu, Indonesia juga menyelesaikan permasalahan batas wilayah dengan Papua Nugini yang dimulai sejak kemerdekaan negara tersebut melalui aktivitas *Joint Border Committee* (JBC) pada tahun 1984. Setelah itu tahun 1986 kedua negara tersebut menandatangani *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Co-operation* (Hamid, 1996:6). Pada tahun 1988 hubungan antara Papua Nugini dengan Indonesia semakin erat dikarenakan ditandatanganinya perjanjian mengenai *Status of Forces Agreement* (SOFA) oleh Menteri Pertahanan dari kedua negara di Jakarta.

Pada tahun 1987 Pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa 25.000 ton beras secara kredit serta mengirimkan delegasi militer tingkat tinggi ke Fiji dalam rangka membentuk suatu aliansi pasca terjadinya kudeta militer di Fiji (Kabutaulaka, 2015). Selain itu, Indonesia juga semakin menguatkan hubungannya dengan Kepulauan Solomon karena Kepulauan Solomon merupakan salah satu negara yang mendukung Indonesia dalam masalah Papua Barat. Selain mendukung masalah Papua sebagai masalah internal Indonesia, pada tahun 1980-an Kepulauan Solomon juga telah mendukung Republik Indonesia dalam penanganan terhadap masalah Timor Timur.

Hubungan antara negara-negara Melanesia dengan Indonesia semakin berkembang ketika negara-negara Melanesia membentuk *Melanesian Spearhead*

Group (MSG) di tahun 1986. Hal ini terlihat dari dukungan Indonesia terhadap tiga negara pendiri MSG, yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, dalam memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Kanak di Kaledonia Baru. Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya usaha FLNKS untuk memperoleh kemerdekaan yaitu dengan bertindak bagi *co-sponsor* bagi ketiga negara pendiri MSG pada tahun 1986 untuk memasukkan masalah dekolonisasi Kaledonia Baru ke dalam Agenda Sidang Umum PBB. Berkat dukungan ASEAN, terutama Indonesia, upaya ketiga negara tersebut memperoleh keberhasilan dimana Komite Dekolonialisasi PBB menghasilkan Resolusi PBB No. 43/53 tahun 1988, dan memasukkan Kaledonia Baru dalam daftar “wilayah yang belum mempunyai pemerintahan (Hamid, 1996:7).

Konsistensi Indonesia terhadap masalah dekolonisasi Kaledonia Baru juga ditunjukkan dengan mengundang wakil FLNKS dalam Konferensi Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT-GNB) ke 10, yang berlangsung di Jakarta pada bulan September tahun 1992. Dalam KTT tersebut Indonesia juga menyampaikan keinginannya untuk semakin mengembangkan kerja sama Selatan-Selatan sebagai sarana untuk memperlancar hubungan antara negara-negara berkembang. Dalam pidatonya, untuk memperlancar kerjasama Selatan-Selatan Presiden Soeharto selaku ketua Gerakan Non-Blok pada saat itu mengusulkan bahwa apabila sejumlah negara berkembang sepakat untuk melaksanakan suatu bentuk kerja sama Selatan-Selatan, maka mereka dapat segera melaksanakannya tanpa menunggu kesepakatan negara-negara lain sepanjang kerjasama tersebut tidak merugikan negara-negara yang lain (Kementerian Luar Negeri RI, 2013).

Negara-negara kawasan Pasifik melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia pada tahun 1993 tidak lagi menjadi fokus utama politik luar negeri Indonesia. Walaupun begitu Indonesia masih tetap melanjutkan hubungan diplomasinya kepada negara-negara Pasifik Selatan, khususnya negara-negara kawasan Melanesia yang semakin menguat karena organisasi sub-regional MSG.

Sejak dibentuknya *Melanesian Spearhead Group* pada tahun 1988, MSG yang walaupun bukan merupakan organisasi resmi kala itu menjadi salah satu organisasi terkuat di wilayah Pasifik Selatan setelah PDF.

Pada tahun 1993 negara-negara anggota MSG menandatangani perjanjian perdagangan bebas antar anggota yaitu *Melanesian Spearhead Group Forum Trade Agreement* (MSG-FTA). MSG-FTA dibentuk dengan tujuan untuk menguatkan perekonomian negara-negara Melanesia untuk dapat menembus pangsa pasar internasional di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan pembebasan akses keluar masuk barang dan jasa antara anggota MSG, sehingga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara anggota (Ministry of Industry Trade and Tourism of Fiji, 2011). Dengan dibentuknya MSG-FTA, proses kerjasama perdagangan antara negara-negara MSG dengan negara-negara lain diluar kawasan Melanesia juga semakin dimudahkan, begitu juga dengan Indonesia. Selain itu, kedekatan Indonesia dengan beberapa negara Melanesia kala itu, yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji juga turut mempermudah proses perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota MSG.

3.2. Perkembangan Kerjasama antara *Melanesian Spearhead Group* dengan Indonesia Tahun 2000-2011

Hubungan antara negara-negara Melanesia dengan Indonesia kemudian menuju perkembangan yang lebih baru di awal tahun 2000-an. Perkembangan hubungan tersebut terdiri dari beberapa bentuk. Perkembangan hubungan dengan negara-negara Melanesia tersebut karena status Indonesia yang juga merupakan negara berkembang sama seperti negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, khususnya kawasan Melanesia. Oleh karena itu Indonesia merasa memiliki kepentingan untuk memberikan bantuan sedapat mungkin kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Berkembangnya hubungan antara negara-negara Melanesia dengan Indonesia dapat dilihat dari keterlibatan Indonesia yang lebih dekat dengan negara-negara Melanesia. Hal ini karena Indonesia sekarang memiliki hubungan bilateral dengan semua negara Kawasan Pasifik Selatan, termasuk Melanesia. Salah satunya adalah penandatanganan *Joint Communique on the Occasion of the Visit of the Foreign Minister of The Republic of Vanuatu to Indonesia* oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Vanuatu Moana Carcasses pada 9 Maret 2004 (Wati, Sari, & Sutisna, 2018:60).

Selain itu keterlibatan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dan Melanesia tidak hanya berupa hubungan bilateral tetapi juga di sisi kelembagaan. Contohnya adalah ketika Indonesia memperoleh status dialog pasca forum dengan Forum Kepulauan Pasifik pada tahun 2001 dan membentuk Dialog Pasifik Selatan-Barat pada tahun 2002 dengan Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru, sebagai cara untuk menjembatani Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (Suryodipuro, 2014).

Peran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, khususnya kawasan Melanesia semakin meningkat sejak Direktorat Kerja Sama Teknik berdiri di tahun 2006. Lebih dari 500 peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan telah berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Indonesia. Peningkatan kapasitas ini mencakup berbagai macam bidang yang menjadi prioritas pembangunan di kawasan Pasifik Selatan seperti konservasi kelautan dan perikanan, penanggulangan bencana, serta *good governance* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011:45).

Pada tahun 2009, di sela Konferensi Kelautan Dunia, Indonesia membentuk Prakarsa Segitiga Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau *Coral Triangle Initiative* (CTI). CTI adalah kerja sama pelestarian terumbu karang serta

pengelolaan sumber daya hayati dan hewani yang mencakup wilayah enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon (Suryodipuro, 2014). CTI ini merupakan upaya mengoptimalkan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Bentuk perkembangan hubungan lainnya adalah terbentuknya kebijakan-kebijakan yang mengatur hubungan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain yaitu:

1. Promosi kerja sama ekonomi dan kerja sama pembangunan, dengan fokus pada bidang tantangan bersama dan kepentingan bersama dan mencakup perdagangan, investasi dan pariwisata;
2. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam manajemen bencana yang dibangun berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan;
3. Memperkuat hubungan sosiokultural dengan membangun latar belakang budaya dan warisan budaya yang sama dengan yang ada di provinsi timur Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan, khususnya negara-negara di kawasan Melanesia, dan bertukar pandangan dan kebijakan tentang bagaimana membangun konektivitas antara pulau-pulau terpencil dan pusat-pusat ekonomi.

Walaupun hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia semakin berkembang, masih banyak rintangan yang dihadapi Indonesia dalam mendekati negara-negara Melanesia, khususnya berkaitan dengan permasalahan di provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satunya adalah dengan Vanuatu yang sejak kemerdekaannya pada tahun 1980 selalu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Lini, pada pidatonya mengatakan bahwa Vanuatu tidak sepenuhnya merdeka jika bagian lain Melanesia, khususnya Papua

Barat, masih dibawah kekuasaan asing (Emslie, 2015:99). Sejak awal kemerdekaan Vanuatu, Perdana Menteri Walter Lini telah menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok radikal, bahkan mengizinkan negaranya digunakan sebagai basis bagi gerakan separatisme.

Pada tahun 2008, *A Vanuatu Free West Papua Association* (VFWPA) dibentuk di Port-Villa. Asosiasi ini dibentuk untuk mengadvokasi perjuangan kemerdekaan dan pemenuhan hak asasi manusia di Papua Barat. Asosiasi ini beranggotakan perwakilan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintahan, Institusi kebudayaan, *The Vanuatu Council of Church*, dan *The Vanuatu National Council of Chiefs*. Tidak hanya itu, Parlemen Vanuatu, dengan persetujuan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi, menyetujui *Watok Blong Yumi Bill* pada tahun 2010 yang berasal dari petisi rakyat untuk mendukung Papua Barat dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri (Bekarekar, 2016:96). Hal ini digunakan untuk membentuk kebijakan spesifik terkait Papua Barat dan menjadi landasan Vanuatu dalam mendukung keanggotaan wakil Papua Barat di *Melanesian Spearhead Group*.



Gambar 3.1. Demonstrasi mendukung kemerdekaan Papua Barat di Port Vila, Vanuatu, tanggal 5 Maret 2010.

Sumber: Ash Pemberton. 2010. West Papua: Independence Movement Defies Repression. Diakses dari www.greenleft.org.au/node/44585 pada tanggal 15 Juli 2017.

Walaupun begitu terdapat perbedaan pendapat dari anggota-anggota *Melanesian Spearhead Group* mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat. Hal ini disebabkan beberapa negara Melanesia seperti Papua Nugini memiliki sikap condong membela Indonesia dalam permasalahan Papua Barat. Pada saat kepemimpinan Sir Michael Somare, Papua Nugini berjanji bahwa wilayahnya tidak akan menjadi basis pergerakan separatisme anti Indonesia, mengontrol aktivitas politik dan izin tinggal, serta akan merepatriasi imigran ilegal dan pemimpin gerakan separatisme. Perdana Menteri Somare saat berbincang dengan Presiden Megawati pada pertemuan APEC di Mexico tahun 2002 menyatakan, “...we don't promote, we don't support them, we know West Papua is still an integral part of Republic of Indonesia” (Bekarekar, 2016:101).

Peluang kerja sama Indonesia dan negara-negara Melanesia semakin terbuka ketika *Melanesian Spearhead Group* menjadi sebuah organisasi resmi pada tahun 2007. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan anggota-anggota MSG tersebut tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi dan perdagangan tetapi juga di bidang penanggulangan bencana akibat dampak perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Usaha Indonesia dalam mendekati kawasan Melanesia membuahkan hasil ketika Indonesia diundang sebagai observer MSG. Indonesia bersama Timor Leste menjadi *observer* pada KTT MSG ke-18 di Suva, Fiji pada bulan Maret 2011.

3.3. Hubungan Indonesia – MSG pasca Diangkatnya Indonesia sebagai *Observer*

Hubungan antara MSG dengan Indonesia semakin meningkat ketika pada Konferensi Tingkat Tinggi MSG ke-18 di Suva, Fiji yang berlangsung pada bulan Maret 2011 yang mana Indonesia bersama dengan Timor Leste diterima sebagai *observer* (peninjau) (Fox, 2015). KTT tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama dan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara MSG, yaitu Perdana Menteri Vanuatu Sato Kilman, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Peter Shanel Agovaka, Menteri Luar Negeri, Perdagangan dan Imigrasi Papua Nugini Don Pomb Polye, dan Charles Washetine sebagai wakil dari organisasi FLNKS. Selain itu di KTT tersebut hadir juga delegasi dari Luxembourg sebagai *special guest*.

Semenjak menjadi observer dalam KTT MSG ke-18, kerja sama MSG dengan Indonesia menjadi semakin erat. Terdapat beberapa bentuk kerja sama antara MSG dengan pemerintah Indonesia. salah satunya dengan Fiji. Sejak tahun 2011, hubungan bilateral Fiji dan Indonesia menuju tingkatan baru dengan terlaksananya

kunjungan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama ke Indonesia pada tanggal 5 April 2011 sampai tanggal 6 April 2011 dan hubungan antara Fiji dengan Indonesia semakin erat dengan dibukanya Kedutaan Besar Fiji di Jakarta, dan penandatanganan perjanjian *Development Cooperation Agreement* (DCA) pada tanggal 27 Mei 2011 (Emslie & Webb-Gannon, 2014:5). Pembangunan Kedutaan Besar Fiji di Indonesia tersebut juga sebagai bentuk dukungan dari Fiji terhadap Indonesia atas masalah Papua Barat.

Selain itu pasca diundangnya Indonesia sebagai observer KTT MSG, hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu juga semakin membaik. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya *Development Cooperation Agreement* (DCA) antara Vanuatu dengan Indonesia pada tanggal 20 Desember tahun 2011 di Jakarta (Pratama, 2017). Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan antara Vanuatu dan Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Selain itu kesepakatan tersebut juga memberikan kerangka hukum bagi kedua negara untuk saling menghormati kedaulatan, kesatuan dan integritas teritorial serta prinsip-prinsip interferensi dalam urusan internal masing-masing negara.

Pemerintah Indonesia diundang lagi sebagai *observer* oleh MSG pada *Foreign Ministerial Meeting* (FMM) dan *Leaders Meeting Summit* MSG di Suva pada tanggal 26 Maret 2012 sampai tanggal 30 Maret 2012 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012). KTT khusus ini dipimpin oleh Perdana Menteri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama dan dihadiri oleh Perdana Menteri Vanuatu Sato Kilman, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Gordon Darcy, Menteri Luar Negeri Papua Nugini Ano Pala dan Victor Tutugoro yang merupakan juru bicara dari FLNKS. Timor Leste juga diundang kembali menjadi *observer* dan Luxembourg juga kembali diundang sebagai *special observer*. Disamping itu hadir pula Delegasi dari Rusia, China, Maroko, dan dari *South Pacific Commission*, *University of the South Pacific* dan *Fiji National University* sebagai *special guest*.

Dalam MSG Summit tersebut, Delegasi Indonesia telah menegaskan kembali komitmen serius dari Pemerintah Indonesia untuk memajukan kerjasama konkrit dengan negara-negara anggota MSG. Hingga saat ini Indonesia telah banyak memberikan bantuan teknis, *capacity building* dan beasiswa kepada negara-negara MSG. Pada bulan Mei tahun 2012 Indonesia menyelenggarakan Training on Fisheries for the MSG Countries di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi positif bagi MSG, dalam waktu dekat Indonesia juga ingin mengembangkan kerjasama dibidang kepolisian, kebudayaan; penanggulangan dan adaptasi terhadap *climate change*, *disaster management*, dan *people-to-people contact* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012).

Sepanjang tahun 2013 terjadi peningkatan kerjasama antara negara-negara Melanesia dengan Indonesia, khususnya Papua Nugini. Peningkatan kerjasama antara Papua Nugini dan Indonesia telah memberikan bobot strategis dari hubungan dan kerja sama bilateral, khususnya dalam konteks menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan yang erat antara kedua negara. Pada tahun 2013 Perdana Menteri Papua Nugini O'Neill ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Gatra, 2013). Selain penandatanganan kesepakatan kemitraan komprehensif, kedua negara juga menandatangani 11 nota kesepahaman. Beberapa bidang yang dilakukan kerjasama meliputi hukum ekstradisi, batas wilayah, pemuda dan olahraga, energi dan pariwisata. Dengan disepakatinya kemitraan antara kedua negara tersebut, kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Namun demikian pada tahun 2013 walaupun ada peningkatan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia, hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu justru semakin memburuk. Adanya pergantian pemerintahan di Vanuatu dari Perdana Menteri Sato Kilman yang dekat dengan pemerintah Indonesia

ke Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil pada tanggal 21 Maret 2013 telah menyebabkan adanya pergeseran kebijakan Pemerintah Vanuatu dalam melakukan hubungan dengan Indonesia. Dalam Agenda Rencana Aksi Prioritas 100 hari Pemerintah Vanuatu di bawah Perdana Menteri Moana Carcasses yang diumumkan pada tanggal 10 April 2013, PM Carcasses telah menyampaikan rencana dukungan terhadap keanggotaan WPNCL di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan penghentian *Development Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dengan Vanuatu (Emslie, 2015:100).

Sikap mendukung kemerdekaan Papua Barat juga ditunjukkan oleh Kepulauan Solomon. Hal ini ditunjukkan pada kunjungan perwakilan dari *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL), yaitu Andi Ayamiseba, Dr. Otto Ondawame, dan Rex Rumakiek pada bulan April 2013 ke Kepulauan Solomon. Pada kunjungan tersebut Perdana Menteri Kepulauan Solomon Darcy Lilo menekankan akan mendukung saudara Melanesia di Papua barat untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Tetapi pandangan Kepulauan Solomon terhadap Indonesia mulai berubah berawal dari kunjungan Perdana Menteri Lilo ke Jakarta pada bulan Agustus 2013. Pada kunjungan itu, Pemerintah Kepulauan Solomon menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan Indonesia (Emslie, 2015:105).

Dukungan Vanuatu terhadap keanggotaan Papua Barat di MSG telah disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu pada Konferensi Tingkat Tinggi *Melanesian Spearhead Group* di Noumea pada tanggal 20 Juni 2013 sampai tanggal 21 Juni 2013. Vanuatu dan FLNKS mengundang wakil WPNCL untuk menghadiri pertemuan para pemimpin MSG di Noumea, Kaledonia Baru. Victor Tutugoro, selaku juru Bicara FLNKS pada pertemuan tersebut menyatakan dukungan penuh pada pengajuan keanggotaan WPNCL di *Melanesian Spearhead Group*. Tetapi pengajuan WPNCL untuk menjadi anggota dari MSG ditunda karena rencana kunjungan delegasi MSG ke Indonesia pada Januari 2014 (Lawson, 2016:518).

Vanuatu yang tidak senang dengan keputusan KTT tersebut kemudian memboikot delegasinya untuk pergi ke Indonesia dan menganggap bahwa program kunjungan delegasi MSG ke Indonesia tersebut diatur oleh Pemerintah Indonesia. Untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat, Vanuatu membawa juga isu ini ke tingkat interasional pada pertemuan PBB pada tanggal 28 September 2013.

Walaupun mendapat hambatan dari Vanuatu dan FLNKS, hubungan antara MSG dengan Indonesia masih terus berjalan. Salah satunya adalah pemberian bantuan dari Indonesia kepada MSG senilai USD 500.000 untuk pembangunan prasarana gedung *Melanesian Spearhead Group Regional Police Academy* di Nandi, Fiji (Kogoya, 2014). Pembangunan sarana tersebut bertujuan untuk menjadi pusat pelatihan kepolisian dari negara-negara MSG. Bantuan secara resmi diberikan oleh Sekretaris Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Langgeng Sulistiyono kepada Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama di Suva pada tanggal 8 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2014 sampai tanggal 16 Januari 2014, delegasi dari MSG melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut bertema *Promoting Economic Ties and Development Cooperation* dan bertujuan untuk mempererat hubungan antara MSG dengan Indonesia (Suryodipuro, 2014). Delegasi MSG dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini, Rimbink Pato, didampingi anggota MSG lain yaitu Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon Soalaoi Clay Forau, wakil dari *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) Yvon Fua, dan *MSG High Representative* Duta Besar Kaliopate Tavola. Dalam kunjungan tersebut, selain mengunjungi beberapa instansi pemerintah Indonesia, kunjungan ke Indonesia tersebut juga untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi pelanggaran HAM masyarakat di Papua dan

memberikan laporan rekomendasi tentang apakah perlu WPNCL untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group.

Kunjungan pertama delegasi MSG adalah kunjungan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 12 Januari 2014. Kunjungan delegasi MSG tersebut adalah untuk menjajaki potensi kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Dalam diskusinya, delegasi lebih menyoroti penanganan adaptasi perubahan iklim (API) dalam kerangka kerja pengurangan risiko bencana (PRB). Pada kunjungan tersebut Indonesia juga mengundang negara-negara MSG untuk mengikuti MMDiREx (*Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise*) di Mentawai, Sumatera Barat, yang diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan Maret 2014 (BNPB, 2014).

Pada tanggal 13 Januari 2014, para Menteri Luar Negeri *Melanesian Spearhead Group* melakukan kunjungan ke provinsi Papua untuk melihat langsung kondisi sebenarnya apa yang terjadi di Papua. Delegasi *Melanesian Spearhead Group* bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, tokoh-tokoh agama, dan jajaran pejabat pemerintah provinsi Papua (Dewangga, 2014). Para Menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* juga mengunjungi Bank Papua dan Sekolah Menengah Kejuruan di Jayapura. Pada kunjungan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG ke provinsi Papua, delegasi MSG melihat secara langsung tentang kondisi yang sebenarnya di Provinsi Papua dan juga mengenai pelaksanaan otonomi khusus di provinsi tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Selain itu para menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* juga menyatakan antusiasme yang besar untuk meningkatkan hubungan dengan Papua, termasuk belajar dari pengalaman pembangunan Indonesia di Papua.

Pada akhir kunjungan tersebut Indonesia dan negara-negara MSG juga menyetujui sebuah *Joint Statement* atau pernyataan bersama yang mengidentifikasi kepotensialan untuk kerja sama di bidang-bidang seperti keamanan pangan, pendidikan, demokrasi, pemerintahan yang baik dan isu-isu sosial dan budaya. Selain itu *Joint Statement* antara MSG dengan Indonesia juga berisi tentang dukungan dari Indonesia dan negara-negara anggota MSG terhadap kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial masing-masing dan prinsip saling tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, sesuai dengan piagam PBB (Suryodipuro, 2014).

Walaupun sudah terjadi kesepakatan antara MSG dengan Indonesia, manuver Vanuatu untuk mendukung pelepasan Papua Barat dari Indonesia masih terus berlangsung. Vanuatu menganggap bahwa hasil kunjungan delegasi MSG ke Indonesia tidak bisa dipercaya dan menganggap Pemerintah Indonesia sudah mengatur kunjungan tersebut sehingga apa yang sebenarnya terjadi di Papua menurut Vanuatu tidak diperlihatkan dengan jujur. Vanuatu kemudian kembali membawa permasalahan Papua Barat ke PBB (Pratama, 2017). Dalam pidatonya di Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada tanggal 4 Maret 2014, Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Kalosil kembali menyuarkan adanya pelanggaran HAM di Papua Barat dan meminta komite untuk mengadakan investigasi atas pelanggaran tersebut (Lawson, 2016:517).

WPNCL kemudian kembali mencoba untuk menjadi anggota MSG pada MSG *Leaders Meeting* di Papua Nugini pada bulan Juni 2014. Walaupun begitu usaha Vanuatu dan WPNCL untuk menempatkan wakil Papua Barat di MSG, setidaknya sebagai *observer*, belum bisa terwujud karena MSG menolak pengajuan dari WPNCL. Alasan mengapa MSG menolak pengajuan dari WPNCL tersebut adalah dikarenakan bahwa klaim WPNCL mewakili 2,5 juta orang Papua Barat tidak dapat dibuktikan (Lawson, 2016:518). Walaupun sudah ditolak dua kali, WPNCL masih belum menyerah untuk berusaha menjadi anggota dari MSG. WPNCL

kemudian berkembang menjadi organisasi yang lebih besar, yaitu *The United Liberation Movement for West Papua* atau disingkat ULMWP.

ULMWP kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi anggota MSG pada KTT Pemimpin MSG ke-20 pada bulan Juni 2015 di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam pengajuannya ULMWP juga membawa petisi yang ditandatangani oleh sekitar 55.000 penduduk Papua yang mendukung ULMWP. Usaha dari Vanuatu dan ULMWP kemudian membuahkan hasil yang mana pada konferensi tersebut ULMWP ditunjuk menjadi *observer* dari MSG, walaupun status Indonesia meningkat dari yang semula *observer* menjadi *associate member* (Fox, 2015). Vanuatu dan ULMWP menganggap bahwa dengan dijadikannya ULMWP menjadi *observer* maka suara ULMWP akan didengar dalam forum MSG dan akan menjadi langkah baru dari usaha mereka untuk melepaskan Papua Barat dari Indonesia.

Walaupun begitu Indonesia tidak khawatir akan keanggotaan ULMWP dikarenakan status keanggotaannya yang lebih rendah dari Indonesia. Selain itu ULMWP hanya mewakili masyarakat Papua yang tidak tinggal di Indonesia. MSG menganggap suara rakyat Papua dan rakyat Melanesia di wilayah nusantara sudah diwakili oleh kelima provinsi di Indonesia yang warganya memiliki budaya Melanesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan provinsi Papua. Oleh karena itu, Indonesia tidak keberatan dengan dijadikannya ULMWP sebagai *observer* karena Indonesia menanggapi suara rakyat Papua sesungguhnya sudah diwakilkan oleh Indonesia di MSG.

BAB 5. KESIMPULAN

Pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon tanggal 24 Juni 2015 sampai tanggal 26 Juni 2015, status Indonesia ditingkatkan dari *observer* menjadi *associate member*. *Melanesian Spearhead Group* atau MSG merupakan sebuah organisasi regional yang berdiri di kawasan Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara yang memiliki ras Melanesia. Organisasi ini mengatur perjanjian perdagangan preferensial dan mendukung pembangunan ekonomi anggotanya. Anggota MSG antara lain Republik Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan *Kanak and Socialist National Liberation Front* atau *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* atau disingkat FLNKS. Bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi *associate member* MSG tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan tersendiri. Hal ini dikarenakan mengingat sikap beberapa anggota MSG yang menolak kerja sama dengan Indonesia, seperti Vanuatu dan FLNKS yang lebih menginginkan wakil Papua Barat *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) untuk menjadi anggota MSG.

Pengangkatan status Indonesia menjadi *associate member* MSG dikarenakan MSG ingin mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia. Dengan semakin eratnya hubungan antar Indonesia dengan MSG, MSG akan mendapat banyak keuntungan dari hubungan tersebut. Keuntungannya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai *associate member*, maka akan semakin mendekatkan Indonesia kepada negara-negara Indonesia yang tentu akan semakin meningkatkan bantuan Indonesia yang merupakan negara pendonor baru kepada kawasan Melanesia. Kerja sama dengan Indonesia seperti kerja sama dalam penanggulangan bencana dan kerja sama teknik untuk peningkatan *capacity building* negara-negara Melanesia juga akan semakin meningkat.

Tetapi peningkatan status Indonesia ini juga sebagai bentuk *bargaining* MSG terhadap Indonesia. Langkah tersebut merupakan sikap serius dari MSG untuk mendekati diri dari Indonesia, sekaligus tetap berpegang teguh pada tujuan awal dari dibentuknya MSG sendiri. Dengan menjadikan ULMWP sebagai *observer* dan Indonesia sebagai *associate member*, maka MSG tetap menghargai jasa dari Indonesia dalam membantu masalah kemerdekaan rakyat Kanak di Kaledonia Baru, serta menghargai bantuan-bantuan dari Indonesia tanpa melanggar tujuan dari alasan dibentuknya MSG itu sendiri. Selain itu anggota-anggota MSG yang mendukung ULMWP dan yang mendukung Indonesia akan dipuaskan dengan keputusan tersebut. Indonesia juga tidak menolak *bargaining* tersebut karena status keanggotaan ULMWP yang lebih rendah dari Indonesia sehingga MSG masih bisa menjalin hubungan baik dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ASEAN. 2016. *ASEAN Economic Community Chartbook 2016*. Jakarta: The ASEAN Secretariat.
- Ashari, Kasan. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Azazian, Rouben, dan Carleton Cramer. 2015. *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania*. Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Burchill, Scott, dan Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. New York: St. Martin's Press.
- Ceadel, Martin. 2009. *Living the Great Illusion: Sir Norman Angell, 1872-1967*. New York: Oxford University.
- Daddow, Oliver. 2009. *International Relations Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, dan Direktorat Jenderal Multilateral. 2011. *Indonesia & Kerjasama Selatan – Selatan*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Dowding, Keith. 2011, *Encyclopedia of Power*. New York: SAGE publications.
- Dunne, Tim, Milja Kurki, dan Steve Smith. 2007. *International Relations Theories; Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press.
- Fry, Greg dan Sandra Tarte. 2015. *The New Pacific Diplomacy*. Acton: Australia National University Press.
- Griffiths, Martin, Steven C. Roach, dan M. Scott Solomon. 2009. *Fifty Key Thinkers in International Relations*. Oxon: Routledge.
- Hamid, Zulkifli. 1996. *Politik di Melanesia*. Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya.

- , 1996. *Sistem Politik di Pasifik Selatan*. Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya.
- Hanlon, David L. 1998. *Remaking Micronesia: Discourses over Development in a Pacific Territory 1944-1982*. Honolulu. University of Hawai'i Press.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press Inc.
- Keohane, Robert O. 1989. *International Institutions and State Power*. Boulder. Westview Press.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- May, Ronald. 2011. *The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity*. Australian Strategic Policy Institute.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia. 1992. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi: Australia Oseania*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Robbins, Joel dan Holly Wardlow. 2005. *The Making of Global and Local Modernities in Melanesia; Humiliation, Transformation and the Nature of Cultural Change*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Spriggs, Matthew. 1997. *The Island Melanesians*. Cambridge: Blackwell Publishers Inc.
- Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3S.
- Wardhani, Baiq L.S.W. 2015. *Kajian Asia Pasifik*. Malang: Intrans Publishing.

JURNAL

- Chowning, Ann. 1979. Leadership in Melanesia. *The Journal of Pacific History*, Vol. 14, No. 2, Islands Leadership [Part 2].
- Emslie, Jim, dan Camellia Webb-Gannon. 2014. MSG Headache, West Papuan heartache? Indonesia's Melanesian foray. *The Asia-Pacific Journal*, Vol. 12, No. 3.
- Kabutaulaka, Tarcisius. 2015. Re-Presenting Melanesia: Ignoble Savages and Melanesian Alter-Natives. *The Contemporary Pacific*, Vol. 27, No. 1.
- Lawson, Stephanie. 2016. West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: Competing Logics in Regional and International Politics. *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 70, No. 5.
- Nye, Joseph S, dan Robert O. Keohane. 1971. Transnational Relations and World Politics: An Introduction. *International Organization*, Vol. 25, No. 3.
- Powell, Robert. 1991. Absolute and Relative Gains in International Relations Theory. *The American Political Science Review*, Vol. 85, No. 4.
- Tampubolon, Lia Kartika. 2015. Kerjasama Teknik Indonesia Indonesia - Melanesian Spearhead Group Terhadap Keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2.
- Wardhani, Baiq L.S.W. 2015. Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?. *Jurnal Global dan Statigis*, Vol. 9, No. 2.
- Wati, Vrameswari Omega, Deffi Ayu Puspito Sari, dan Sobar Sutisna. 2018. Disaster Relief as Indonesia Soft Power Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu. *International Journal of Multi Disipline Science (IJ-MDS)*, Vol. 1, No. 1.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001. *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. 21 November 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. Jakarta.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Anshari G, Yumna Sani. 2016. Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan. *Skripsi*. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Bekarekar, Wirda Wanda Sari. 2016. Alasan Indonesia Melakukan Kerja Sama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prastiwi, Renanda. 2017. Kepentingan Indonesia Bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). *Skripsi*. Jember: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

INTERNET

- BNPB. 2014. *Potensi Kerjasama Penanggulangan Bencana di Kawasan Negara-Negara MSG (Melanesian Spearhead Group) ke BNPB 12 Januari 2014*. diakses dari: <https://www.bnpb.go.id/potensi-kerjasama-penanggulangan-bencana-di-kawasan-negara-negara-msg-melanesian-spearhead-group-ke-bnpb-12-januari-2014> pada tanggal 3 Januari 2017.
- Cain, Tess Newton. 2014. *The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do?*. diakses dari: <http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/03/14/The-Melanesian-Spearhead-Group-What-is-it-and-what-does-it-do.aspx> pada tanggal 08 Desember 2015.
- Dewangga, Satya. 2014. *Makna Strategis Kunjungan Para Menlu Melanesia bagi Integrasi Papua*. diakses dari: <https://news.detik.com/kolom/2474434/makna-strategis-kunjungan-para-menlu-melanesia-bagi-integrasi-papua> pada tanggal 12 Januari 2018.
- Fox, Liam. 2015. *Indonesia admitted to Melanesian Spearhead Group, West Papuan group given observer status*. diakses dari: <http://www.abc.net.au/news/2015-06-25/indonesia-admitted-to-melanesian-intergovernmental-group/6573968> pada tanggal 20 Desember 2015.

- Gatra, Sandro. 2013. *Presiden Terima Kunjungan PM Papua Nugini*. diakses dari: <https://properti.kompas.com/read/2013/06/17/16181559/Presiden.Terima.Kunjungan.PM.Papua.Nugini> pada tanggal 30 Juli 2018.
- Goisler, Wim. 2017. *Benny Wenda: Tujuan ULMWP Bukan untuk Runtuhkan NKRI*. diakses dari: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/benny-wenda-tujuan-ulmwp-bukan-untuk-runtuhkan-nkri> pada tanggal 12 Desember 2017.
- Gumbis, Donald. 2013. *MSG Disaster Response Force? Not Likely*. diakses dari: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/msg-disaster-response-force-not-likely> pada tanggal 11 January 2018.
- Hatch, David. 2012. *Indonesia, Emerging Aid Donor*. diakses dari: <https://archive.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-emerging-aid-donor> pada tanggal 08 Agustus 2017.
- IUCN. 2014. *Melanesian Spearhead Group signs agreement with largest global environment organization*. diakses dari: <https://www.iucn.org/content/melanesian-spearhead-group-signs-agreement-largest-global-environment-organization> pada tanggal 11 Januari 2017.
- Jakarta Globe. 2015. *Indonesia Granted 'Associate Member' Status of MSG, West Papua Bid Unsuccessful*. diakses dari: <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-granted-associate-member-status-msg-west-papua-bid-unsuccessful/> pada tanggal 20 Desember 2015.
- Jones, Andrew. 2007. *Comparatively Assess Neo-realism and Neo-liberalism, Whose Argument Do You Find the More Convincing and Why?*. diakses dari: <http://www.e-ir.info/2007/12/21/comparatively-assess-neo-realism-and-neo-liberalism-whose-argument-do-you-find-the-more-convincing-and-why/> pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Kabutaulaka, Tarcisius. 2015. *West Papua: MSG's Challenge, Indonesia's Melanesian Foray*. diakses dari: http://dailypost.vu/news/article_0acf8acb-bd32-54db-8d6c-9fafbf83373f.html pada tanggal 29 Juli 2017.
- Kawilarang, Renne R.A. 2015. *Kelompok Negara MSG Puji Cara RI Tangani Bencana*. diakses dari: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/623330-kelompok-negara-msg-puji-cara-ri-tangani-bencana> pada tanggal 17 Januari 2017.

- Kementerian Luar Negeri RI. 2012. *Partisipasi Indonesia Sebagai Observer pada KTT Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG)*. diakses dari: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Partisipasi-Indonesia-Sebagai-Observer-pada-KTT-Khusus-Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx> pada tanggal 24 Desember 2016.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2013. *Gerakan Non-Blok (GNB)*. diakses dari: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Gerakan-Non-Blok.aspx> pada tanggal 30 Agustus 2017.
- Kogoya, Alfred. 2014. *Romantisme Hubungan Indonesia -MSG: Pembangunan di Papua sebagai 'Modelling' MSG*. diakses dari: https://www.kompasiana.com/alfredkogoya/romantisme-hubungan-indonesia-msg-pembangunan-di-papua-modelling-bagi-msg_55289046f17e61ba628b45d1 pada tanggal 14 Desember 2015.
- Melanesian Spearhead Group Secretariat. 2011. *Brief about MSG*. diakses dari: <http://msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg> pada tanggal 08 Desember 2015.
- Melanesian Spearhead Group Secretariat. 2011. *Who We Are?*. diakses dari: <http://www.msgsec.info/index.php/who-we-are> pada tanggal 08 Desember 2015.
- Melanesian Spearhead Group Secretariat. 2011. *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group*. diakses dari: <http://www.msgsec.info/index.php/publication/reports?download=3%3Amsg-agreement> pada tanggal 28 Agustus 2016.
- Melanesian Spearhead Group Secretariat. 2013. *22 Mar 2013 - MSG Council of Arts & Culture Meeting*. diakses dari: <http://www.msgsec.info/index.php/publicationsdocuments-a-downloads/press-release/182-22-march-2013-msg-council-of-arts-a-culture-meeting> pada tanggal 18 Januari 2017.
- Ministry of Industry, Trade and Tourism of Fiji. 2011. *Melanesian Spearhead Group (MSG) Trade Agreement*. diakses dari: <http://www.mit.gov.fj/index.php/divisions/trade-division/regional-trade-agreement/melanesian-spearhead-group-msg-trade-agreement> pada tanggal 08 Desember 2015.
- Narayan, Nitish. 2016. *INDONESIA AND PIDF COLLABORATE ON CAPACITY BUILDING TRAINING'S FOR PACIFIC ISLAND COUNTRIES*. diakses

- dari: <http://pacificidf.org/indonesia-and-pidf-collaborate-on-capacity-building-trainings-for-pacific-island-countries/> pada tanggal 14 Januari 2018.
- New World Encyclopedia. 2008. *Melanesia*. Diakses dari: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Melanesia> pada tanggal 22 Maret 2017.
- Nugraha, Fajar. 2015. *Raih Status Anggota MSG, Indonesia Siap Perkuat Kerja Sama Teknis*. diakses dari: <http://internasional.metrotvnews.com/asia/zNP6aBWk-raih-status-anggota-msg-indonesia-siap-perkuat-kerja-sama-teknis> pada tanggal 23 Mei 2016.
- Pacific Institute of Public Policy. 2008. *MSG: Trading on Political Capital and Melanesian Solidarity*. diakses dari: <http://www.pacificpolicy.network/wp-content/uploads/2012/05/D02-PiPP.pdf> pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Parlina, Ina, dan Margareth. S. Aritonang. 2014. *Melanesian Respect RI's Sovereignty*. diakses dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/16/melanesians-respect-ri-s-sovereignty.html> pada 28 Agustus 2017
- Piliang, Feri Rahmat Chandra. 2015. *Indonesia and Melanesian Spearhead Group (MSG)*. diakses dari: <http://e-internasionalista.com.br/2015/11/12/guest-post-indonesia-and-melanesian-spearhead-group-msg/> pada tanggal 5 Januari 2016.
- Pramono, Siswo. 2016. *With Indonesia, MSG benefits from Asia Century*. diakses dari: <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/10/28/with-indonesia-msg-benefits-from-asian-century.html> pada tanggal 2 November 2016.
- Pratama, Erlangga. 2017. *Menyoal Manuver Vanuatu dan Solomon Islands dalam Isu Papua*. Diakses dari: <http://theglobal-review.com/menyoal-manuver-vanuatu-dan-solomon-islands-dalam-isu-papua/> pada tanggal 30 Juli 2018.
- Pryke, Jonathan. 2013. *The Pacific's Aid Boom*. diakses dari: <http://www.devpolicy.org/the-pacifics-aid-boom-02092013/> pada tanggal 14 Januari 2018.
- Radio New Zealand. 2015. *Indonesia says it will help develop Melanesia*. Diakses dari: <http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/>

- [201760375/indonesia-says-it-will-help-develop-melanesia](https://doi.org/10.21760/375/indonesia-says-it-will-help-develop-melanesia) pada tanggal 23 Mei 2016.
- Rahman, Abdul. 2014. *PROGRAM CAPACITY BUILDING INDONESIA UNTUK NEGARA ANGGOTA MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)*. diakses dari: <http://supmwaiheru-kkp.sch.id/program-capacity-building-indonesia-untuk-negara-anggota-melanesian-spearhead-group-msg/> pada tanggal 13 Agustus 2017.
- Rumkabu, Elvira. 2016. *Melanesian Solidarity vs Economic Power*. diakses dari: <http://www.newmandala.org/melanesian-solidarity-vs-economic-power/> pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Siadari, Eben E. 2016. *Sekjen ULMWP Dilarang Masuk Papua Nugini*. diakses dari: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sekjen-ulmwp-dilarang-masuk-papua-nugini> pada tanggal 30 Juli 2018.
- Suryodipuro, Arto. 2014. *Building relations with Pacific Island countries*. diakses dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/building-relations-with-pacific-island-countries.html> pada tanggal 21 Februari 2017.
- Tahalele, Miranda. 2016. *The Changing Role of Indonesia in Development Cooperation: The Shifting rhetoric of South-south cooperation*. Diakses dari: http://devpolicy.org/2016-Australasian-aid-conference/Presentations/Day-2/4b-Aid-to-and-from-Asia_Tahalele.pdf pada tanggal 18 Januari 2018.
- Temple Now. 2008. *Genome scan shows Polynesians have little genetic relationship to Melanesians*. diakses dari: <http://news.temple.edu/news/genome-scan-shows-polynesians-have-little-genetic-relationship-melanesians> pada tanggal 22 Maret 2017.
- Uaga, Evha. 2014. *Babak Baru Hubungan Indonesia-Vanuatu dan Implikasinya Dalam Permasalahan Papua*. diakses dari: https://www.kompasiana.com/evha.uaga/babak-baru-hubungan-indonesia-vanuatu-dan-implikasinya-dalam-permasalahan-papua_54f95e25a33311a13d8b50c2 pada tanggal 18 Januari 2018.
- UNIDO. 2017. *TRADE PROMOTION CAPACITY BUILDING - INDONESIA*. diakses dari: <https://tii.unido.org/category/trade-promotion-capacity-building-indonesia> pada tanggal 26 Januari 2018.

- Wenda, Pares L. 2016. *Mengenal Beda ULMWP dan FLNKS*. diakses dari: <http://seputarsulawesi.com/berita-mengenal-beda-ulmwp-dan-flnks-.html> pada tanggal 08 Maret 2016.
- West Melanesia. 2015. *Melanesia and The Melanesians*. diakses dari: <http://www.westmelanesia.com/melanesia-the-melanesians/> pada tanggal 22 Maret 2017.

